

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024
Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	7
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023	3
Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023	5
Tabel 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	2
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersiat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembidaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

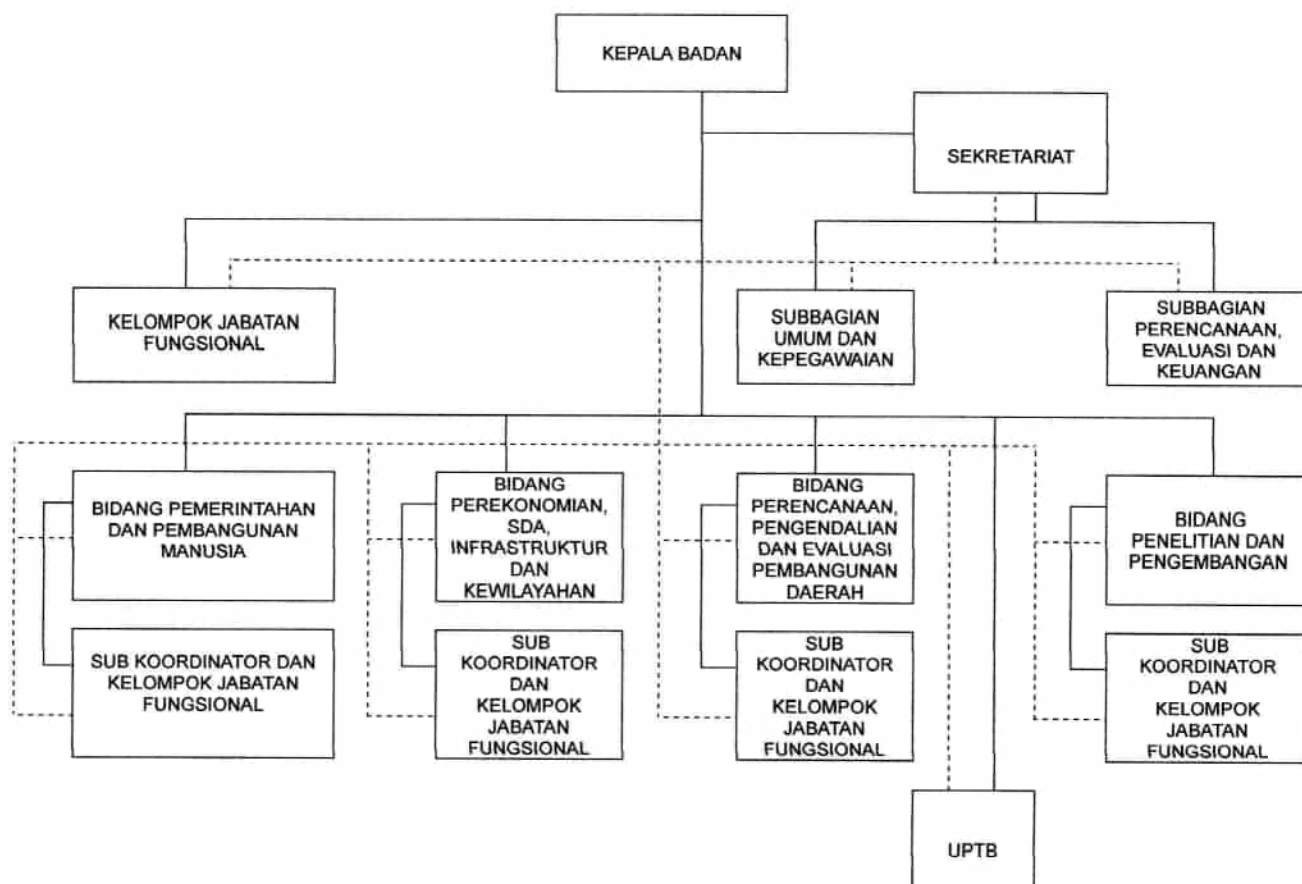
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD;	89
		2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;	100%
		3. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;	100%
		4. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah;	100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan melalui program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan	5. Persentase program RKPD selaras dengan Program RPJMD;	100%
		6. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu;	100%
		7. Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu;	100%

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8. Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu;	100%
		9. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemsosbud;	100%
		10. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;	100%
		11. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah;	100%
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	12. Persentase laporan hasil litbang	100%
		13. Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD;	100%
		14. Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan;	100%
		15. Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	73

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

rumus:

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	89	89	88,5	99,44
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;	100%	100%	100,08%	100,08

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah;	100%	100%	100%	100
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan melalui program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu;	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu;	100%	100%	100%	100
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu;	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemsosbud;	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah;	100%	100%	100%	100
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase laporan hasil litbang	100%	100%	100%	100
		Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD;	100%	100%	100%	100
		Persentase Pemberdayaan	100%	100%	100%	100

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
		Stakeholder Kelitbangan;				
		Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	73	73	na	-
	Rata-rata Capaian					99,97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebesar 99,97% dengan kategori "Sangat berhasil"

Indikator kinerja skor capaian nilai RIDA (SIDA) sampai dengan triwulan IV data belum tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RIDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitas Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyesuaian pengukuran IDSD.

Adapun faktor-faktor pendukung capain kinerja antara lain:

1. Ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
2. Dukungan dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder dan masyarakat Kota Pekalongan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang	5.312.400.000,-	5.312.400.000,-	5.039.806.288,-	94,87%

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	926.309.000,-	926.309.000,-	892.346.900,-	96,33%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	478.870.000,-	478.870.000,-	440.288.902,-	91,94%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	924.380.000,-	924.380.000,-	888.842.742,-	96,16%
	JUMLAH :	7.641.959.000,-	7.641.959.000,-	7.261.284.832,-	95,02%
Rata-rata Capaian					95,02%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 95,02%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,02%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 99,97%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,21%.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 99,97%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 95,02%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 5,21%

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pencermatan atas program/kegiatan/pekerjaan yang harus segera dimulai agar dapat terselesaikan sesuai perencanaan pada Triwulan berjalan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya koordinasi yang lebih intens terkait dengan jadwal pencairan anggaran agar dapat sejalan dengan pelaksanaan program/ kegiatan/ pekerjaan.
3. Perlunya pengawalan dalam pembagian tugas agar setiap personil dapat secara proposial dalam berkontribusi bagi pencapaian target kinerja.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

WALI KOTA

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan

CAYEKI WIDIGDO, AP., M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKRETARIS BAPPEDA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Barokah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

SEKRETARIS BAPPEDA



UJIAN TO PURWANTO, S.SiT., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197903082005021002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	7
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2023 -----	3
Tabel 2.2 Pengukuran Skala Ordinal -----	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023 -----	6
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 -----	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan -----	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan, menyelenggarakan fungsi :

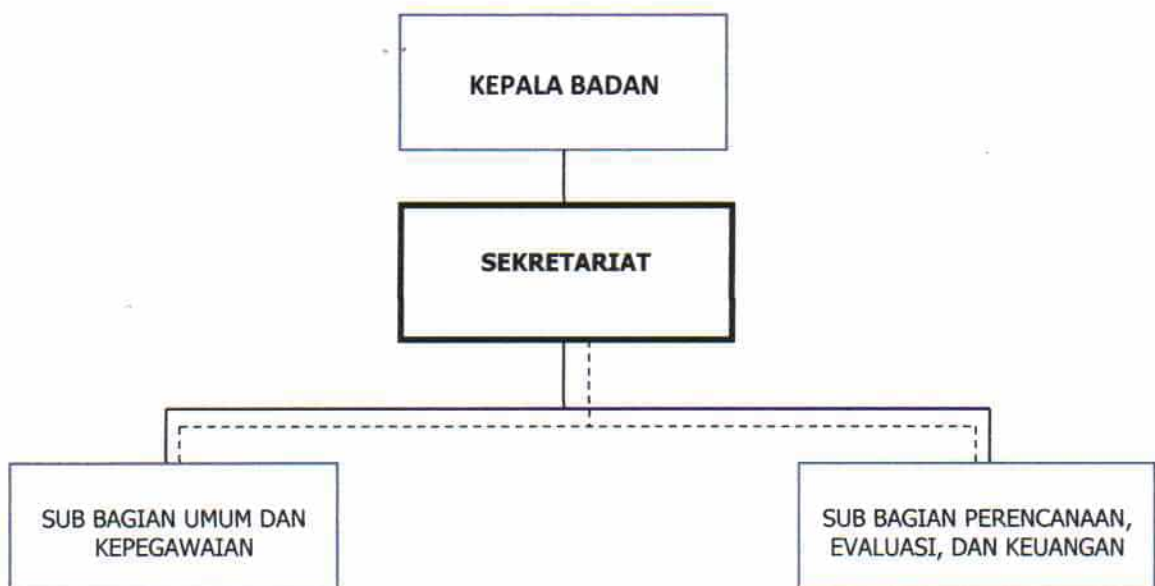
- a. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan anggaran di lingkup Badan;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah pada lingkup Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup Badan;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkup Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah di lingkup badan;
- h. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Dalam struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan, Sekretaris Bappeda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan. Sekretaris BAPPEDA membawahi dua Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda. Secara lengkap, struktur organisasi jabatan Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan, sebagaimana dalam gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan



Sumber : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dan dituangkan ke dalam Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris Bappeda
Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
2	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	daerah	Perangkat Daerah	
4	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
6	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATEGORI
90,01 sd lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 sd 90	Tinggi / berhasil
65,1 sd 75	Sedang / Cukup berhasil
50,1 sd 65	Rendah / Tidak berhasil
0 sd 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100
2	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100
3	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100
4	Tercapainya administrasi umum perangkat	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,25%	100,25
5	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100
6	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100
		RATA-RATA CAPAIAN				100,04

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 dari 6 kegiatan dengan 6 (enam) indikator, rata-rata capaian kinerjanya 100,04% atau dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang baik dengan seluruh pegawai Bappeda, maupun stake holder terkait;
2. Pelaksanaan pekerjaan rutin sesuai perencanaan, sehingga tercapai sesuai dengan target.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang lebih baik lagi dengan seluruh pegawai, ASN dan NON ASN, serta stake holder terkait
2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai target kinerja yang sudah ditentukan pada setiap triwulan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d TW IV (Rp)	Realisasi s/d TW IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	15.000.000,-	15.000.000,-	14.594.800,-	97,30
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	4.279.165.000,-	4.279.165.000,-	4.054.628.620,-	94,75
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	752.565.000,-	752.565.000,-	725,019.463,-	96,34
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	159.270.000,-	159.270.000,-	154.388.315,-	97,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	101.400.000,-	101.400.000,-	86.175.090,-	84,99

	Daerah				
	TOTAL :	5.312.400.000,-	5.312.400.000,-	5.039.806.288,-	
	<i>Rata-rata penyerapan anggaran</i>				94,87

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 94,87 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,87%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100,04%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,45 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Pencapaian kinerja sesuai dengan target, sedangkan keuangan dapat lebih efisien ;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tercapai 100,04% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,87%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 5,45 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program pada Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan pada Tahun 2023 adalah **Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan agar lebih baik lagi kinerja maupun keuangan, agar setiap target triwulanan dapat dipertahankan realisasinya dan sebisa mungkin ditingkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya.**

Pekalongan, 02 januari 2024

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19750729 199412 1 001

SEKRETARIS BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



UJIAN TO PURWANTO, S.SiT., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197903082005021002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Kepala Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan



IMRON ROSYIDI S. Pi, M. App. Sc.

Pembina

NIP. 19780529 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
C Capaian Anggaran	5
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BAPPEDA, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan.

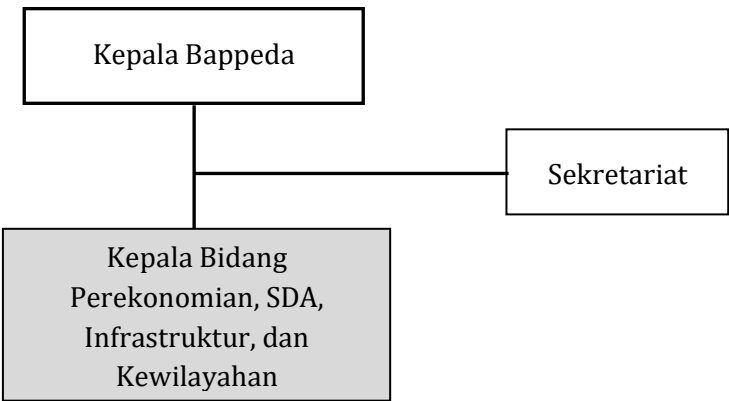
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Penganalisaan dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah di provinsi lingkup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
8. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan pogram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terfasilitasinya dan terlaksananya monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase kegiatan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dilaksanakan	100%
2	Terkoordinasinya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Perubahan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terfasilitasinya dan terlaksananya monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase kegiatan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
2	Terkoordinasinya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil”. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya:

1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait (OPD dan NGO), terutama dalam pemenuhan data pendukung dokumen perencanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Berupaya mengupdate peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Rp 87.400.000	Rp 87.400.000	Rp 72.220.401	82,63 %
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 235.470.000	Rp 235.470.000	Rp 225.481.100	95,76 %
Rata-rata Capaian					92,20%

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 92,20%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,46%.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi anggaran adalah sebesar 92,2%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,46%.

B. Rekomendasi

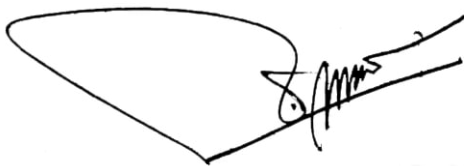
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan dan Pagu Anggaran mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 02 Januari 2024

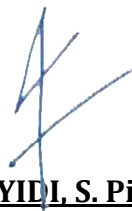
Mengetahui

Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan,



CAYEKTI WIDIGDO, A.P., M. Si
NIP. 19750729 199412 1 001

Kepala Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan,



IMRON ROSYIDI, S. Pi, M. App. Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) “Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan” Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan” mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja “Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan” melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan


SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
Perencana

NIP. 19820925 200604 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
C Capaian Anggaran	5
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Triwulan IV Tahun 2023	4
Tabel. 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.

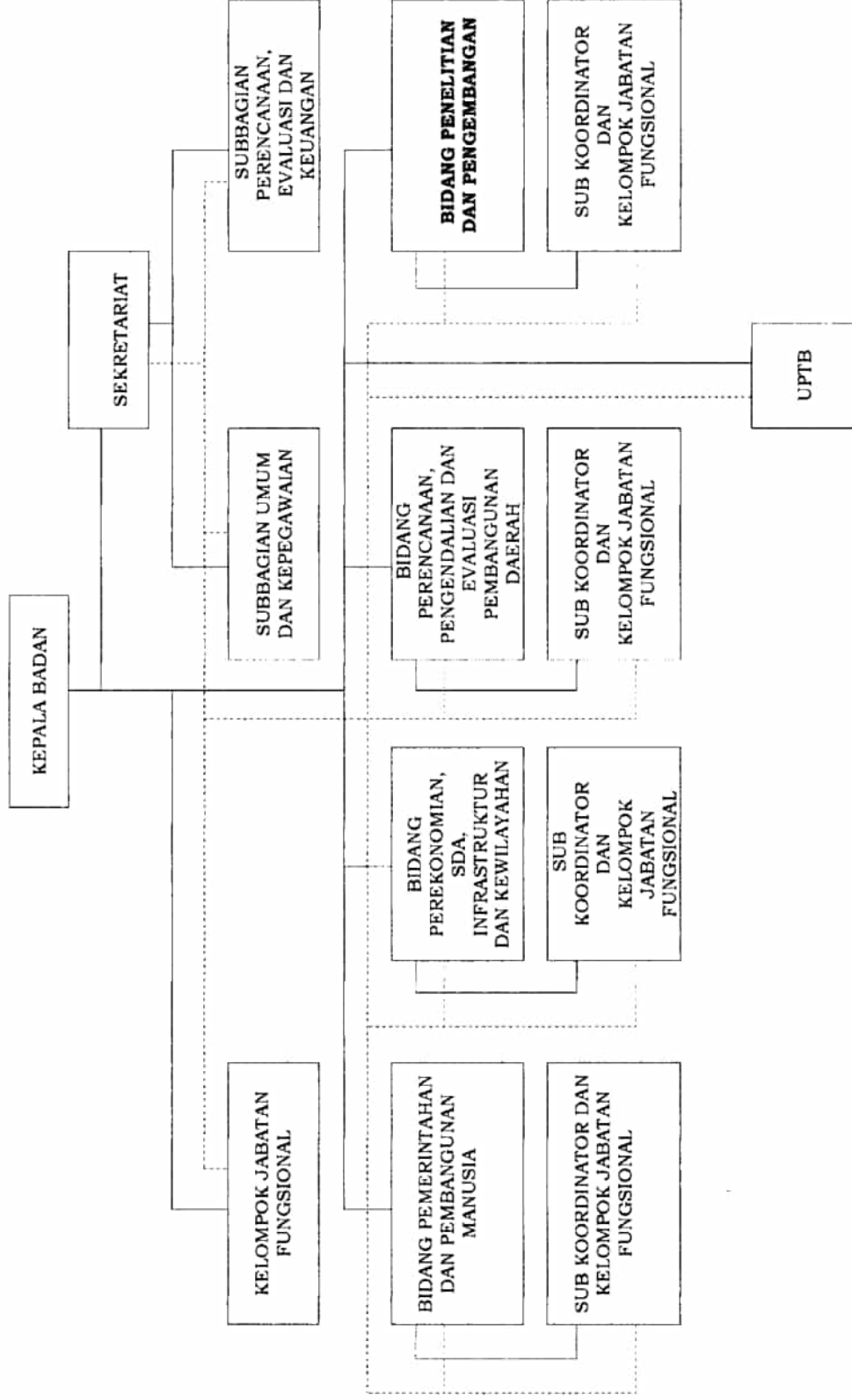
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
5. Penyelenggaraan pengembangan inovasi dan teknologi;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) dan/atau standar pelayanan (sp) bidang tugasnya;
9. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran kedinasan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan kepala bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja “Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100%
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100%
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{targetan penggunaan}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Triwulan IV Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100%	100 %	100 %	100

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
	Pengkajian Peraturan					
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100%	100%	100 %	100
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja “Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan” adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat tinggi”. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (Perguruan Tinggi dan OPD), terutama dalam pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-update peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	263,220,000	263,220,000	243,319,916	92,24%
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	416,750,000	416,750,000	412,060,200	98,87%
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	244,410,000	244,410,000	233,462,626	95.52 %
TOTAL		924,380,000	924,380,000	888,842,742	
Rata-rata Penyerapan Anggaran					96,16%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 96,16%.

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,16%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,99%.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,16%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,99%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang Penelitian dan Kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan, perlu pencermatan terhadap kebutuhan anggaran sehingga penganggaran sesuai dengan kebutuhan
2. Pembagian anggaran kas agar disesuaikan dengan perencanaan waktu kegiatan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19750729 199412 1 001

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
Pembina
NIP. 19820925 200604 2 009

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**



**RR. MURNI INDAH WIJAYANTI, SKM, M.Si
NIP. 19810312 200501 2 012**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



RR. MURNI INDAH WIJAYANTI, SKM, M.Si

Pembina

NIP.19810312 200501 2 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	8
C Capaian Anggaran	9
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023.....	7
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	8
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan IV Tahun 2023	8
Tabel 2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Triwulan IV TA. 2023.....	9

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan.....	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

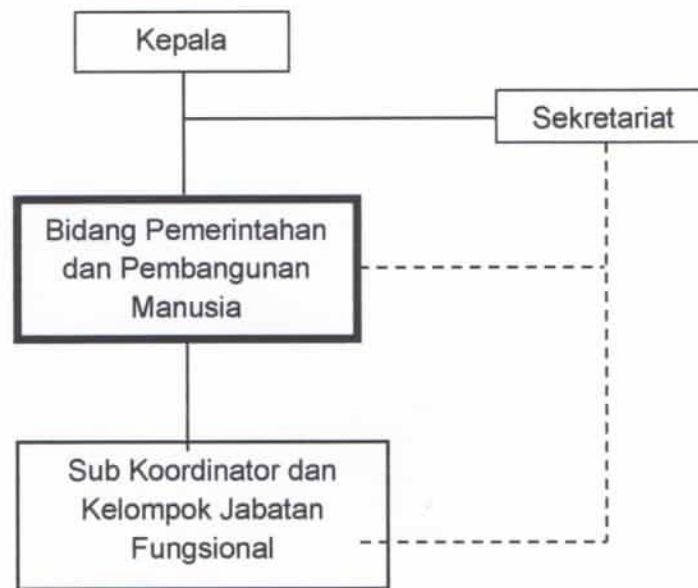
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RPJPD);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah di Provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. pengoorganisasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang optimal	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / cukup berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / tidak berhasil
0 s.d. 50	Sangat rendah / sangat tidak berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian						100%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja sampai dengan Triwulan IV TA. 2023 telah mencapai 100% dan berada dalam kategori sangat tinggi/berhasil.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan Bidang lainnya di Bappeda serta dengan OPD/Stakeholder terkait.
2. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat sehingga tercapai sesuai target.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Perubahan) (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp)	% Capaian
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	156.000.000,-	156.000.000,-	142.587.401,-	91,40%
Rata-Rata Capaian					91,40%

Dari tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 91,40 % dan berada dalam kategori sangat tinggi/sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Triwulan IV TA. 2023 sebesar 100%, maka terdapat efisiensi sebesar 9,41%. Efisiensi tersebut disebabkan karena kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 91,40% dan berada dalam kategori sangat tinggi/sangat berhasil.

B. Rekomendasi

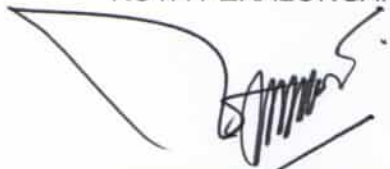
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dijadwalkan.
2. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750729 199412 1 001

KABID PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



RR. MURNI INDAH WIJAYANTI, SKM. M.Si
NIP. 19810312 200501 2 0 12

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



MUHAMMAD HARJO, S.Kom, M.Ak

Pembina

NIP. 19800528 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B. Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A. Perjanjian Kinerja	7
B. Capaian Kinerja	7
C. Kinerja Keuangan	9
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Rekomendasi	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	8
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2023.....	8
Tabel 2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Pekalongan.....6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

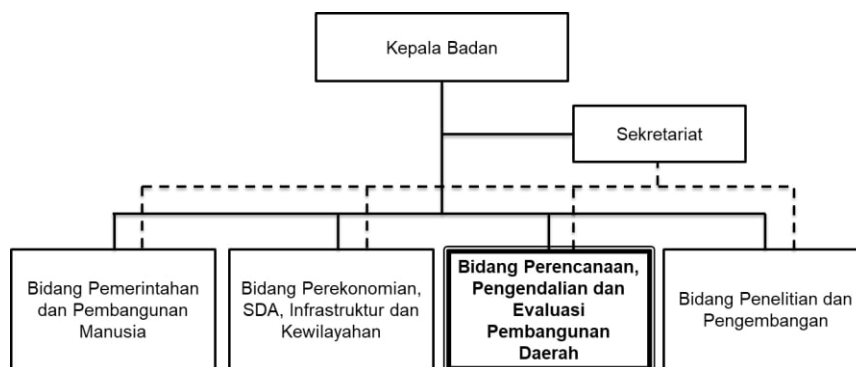
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun fungsi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
4. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
5. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
6. pengevaluasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
7. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
8. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
9. penyajian dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
10. pengelolaan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
11. penyusunan, pelaksanaan, serta analisis evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan sebagaimana Gambar 1.1. dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Pekalongan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen
3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / cukup berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / tidak berhasil
0 s.d. 50	Sangat rendah / sangat tidak berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
	Perencanaan Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan daerah				
3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Rata-rata Capaian					100 persen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat tinggi / sangat berhasil.

C. Kinerja Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d. Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/(4)*100
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	761.574.000	761.574.000	728.966.380	95,72%
2	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	23.250.000,00	23.250.000	23.149.000	99,57%
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan	141.485.000,00	141.485.000	140.231.520	99,11%
Rata-rata Capaian					98,13%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 98,13%.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 98,13%. Maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 1,90%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas target pagu anggaran Triwulan IV.
2. Melakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
3. Memantau dan mengendalikan pengadministrasian kegiatan agar realisasi anggaran sesuai dengan target.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Kepala Bidang PPEPD,



MUHAMMAD HARJO, S.Kom, M.Ak
NIP. 19800528 200501 1 007

Mengetahui,
Kepala Bappeda



CAYEKTI WIDIGDO, A.P. M Si
NIP. 19750729 199412 1 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MADYA



SUTOTO, ST, MT
NIP. 19710217 199603 1 001

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

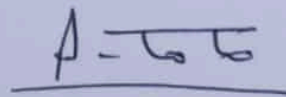
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Perencana Ahli Madya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Perencana Ahli Madya melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Perencana Ahli Madya,



Sutoto, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710217 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB IV PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023.....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

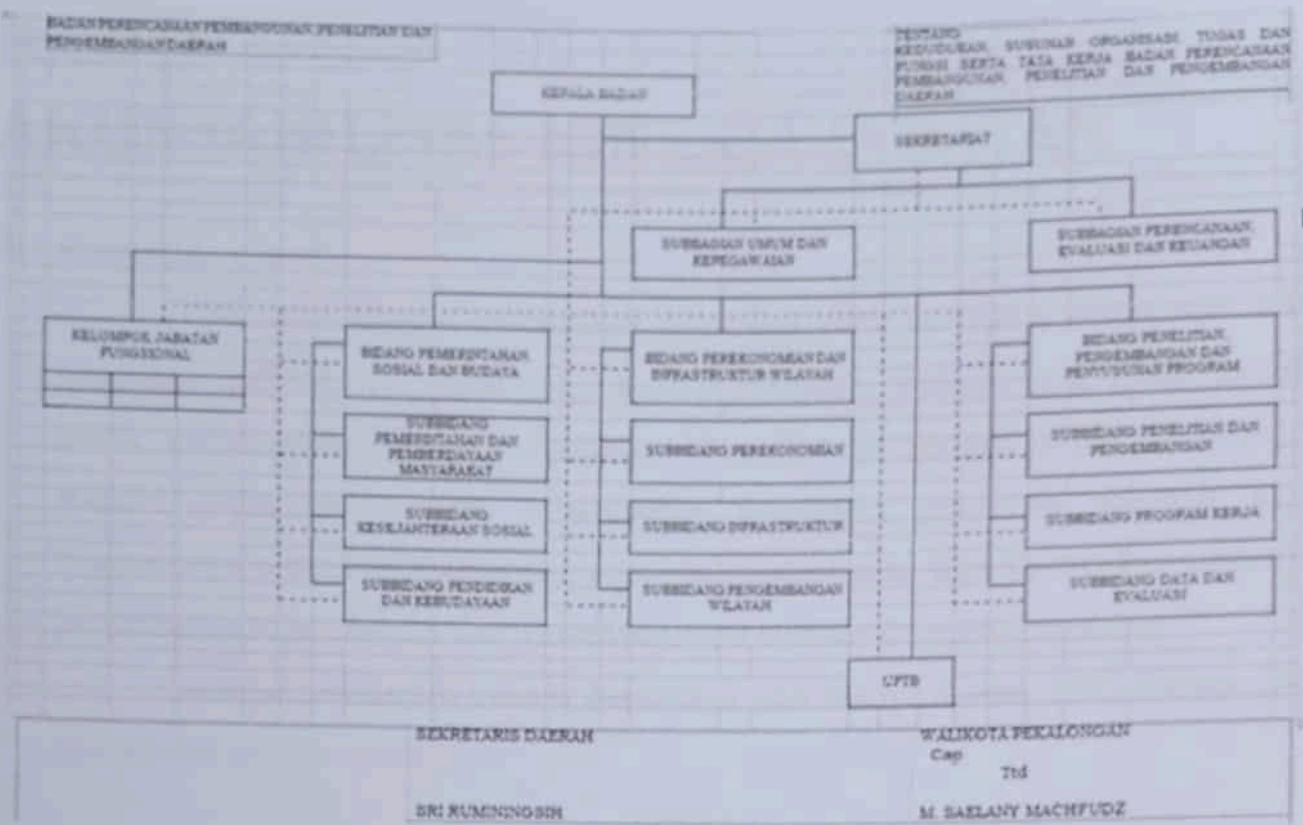
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. identifikasi masalah/isu strategis;
- b. penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- c. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- e. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah. Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana. Kedudukan Perencana ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana menjadi bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Perencana Ahli Madya Tahun 2023 Sutoto, ST, MT, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Madya
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang berkualitas	Jumlah Makalah Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang tersusun	4 makalah
2	Menyusun kebijakan strategis/program jangka panjang yang berkualitas	Jumlah dokumen kebijakan strategis/program jangka panjang yang tersusun	2 dokumen
3	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM yang tersusun	6 laporan
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang tersusun	4 laporan

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang Litbang yang tersusun	2 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Perencana Ahli Madya

Triwulan IV Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang berkualitas	Jumlah Makalah Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang tersusun	4 makalah	4 makalah	4 makalah	100
2	Menyusun kebijakan strategis/program jangka panjang yang berkualitas	Jumlah dokumen kebijakan strategis/progrm jangka panjang yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
3	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM yang tersusun	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	4 laporan	4 laporan	4 lapoarn	100

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
	pembangunan yang berkualitas	pelaksanaan rencana pembangunan yang tersusun				
5	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang Litbang yang tersusun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100
Rata-rata Capaian						100

Hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100%, dengan kategori "Sangat Berhasil".

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga Fungsional Perencana dapat menjalankan tugas tepat waktu.
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai sehingga Fungsional Perencana dapat menjalankan tugas dengan baik.

BAB IVI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil"

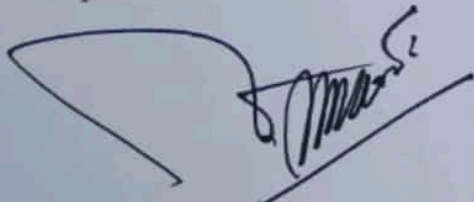
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 adalah setiap kegiatan dapat konsisten dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

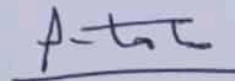
Mengetahui

Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP, M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

Perencana Ahli Madya,



Sutoto, ST, MT
NIP. 19710217 199603 1 004

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MADYA



Vita Marshinta Devi, ST
NIP. 19720312 199803 2 007

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Perencana Ahli Madya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Perencana Ahli Madya melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Perencana Ahli Madya



Vita Marshinta Devi, ST

(Pembina Tingkat I)

NIP. 19720312 199803 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel2.1.	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023	2
Tabel 2.2.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel2.3.	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023	3

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

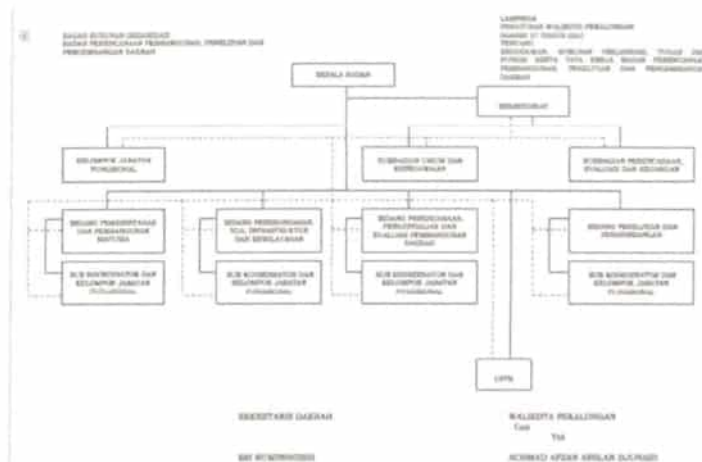
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana Ahli Madya mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
2. Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah;
3. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan; dan
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Ahli Madya
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah
2	Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan
4	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan III Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah	4	4	100
2	Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	4	4	100
3	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan	3	3	100
4	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	1	1	-
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan	4	4	100
Rata-rata Capaian						100

Hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Penyusunan rencana kegiatan telah memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan.
3. Ketersediaan SDM fungsional perencana sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

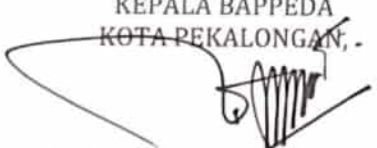
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indicator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN, -


CAYEKTI WIDIGDO, AP, M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MADYA,


VITA MARSHINTA DEVI, ST
NIP. 19720312 199803 2 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MADYA



Slamet Miftakhudin, ST
NIP. 19781222 200501 1 003

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Perencana Ahli Madya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Perencana Ahli Madya melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Perencana Ahli Madya



Slamet Miftakhudin, ST

(Pembina Tingkat I)

NIP. 19781222 200501 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel2.1.	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023	2
Tabel 2.2.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel2.3.	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023	3

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

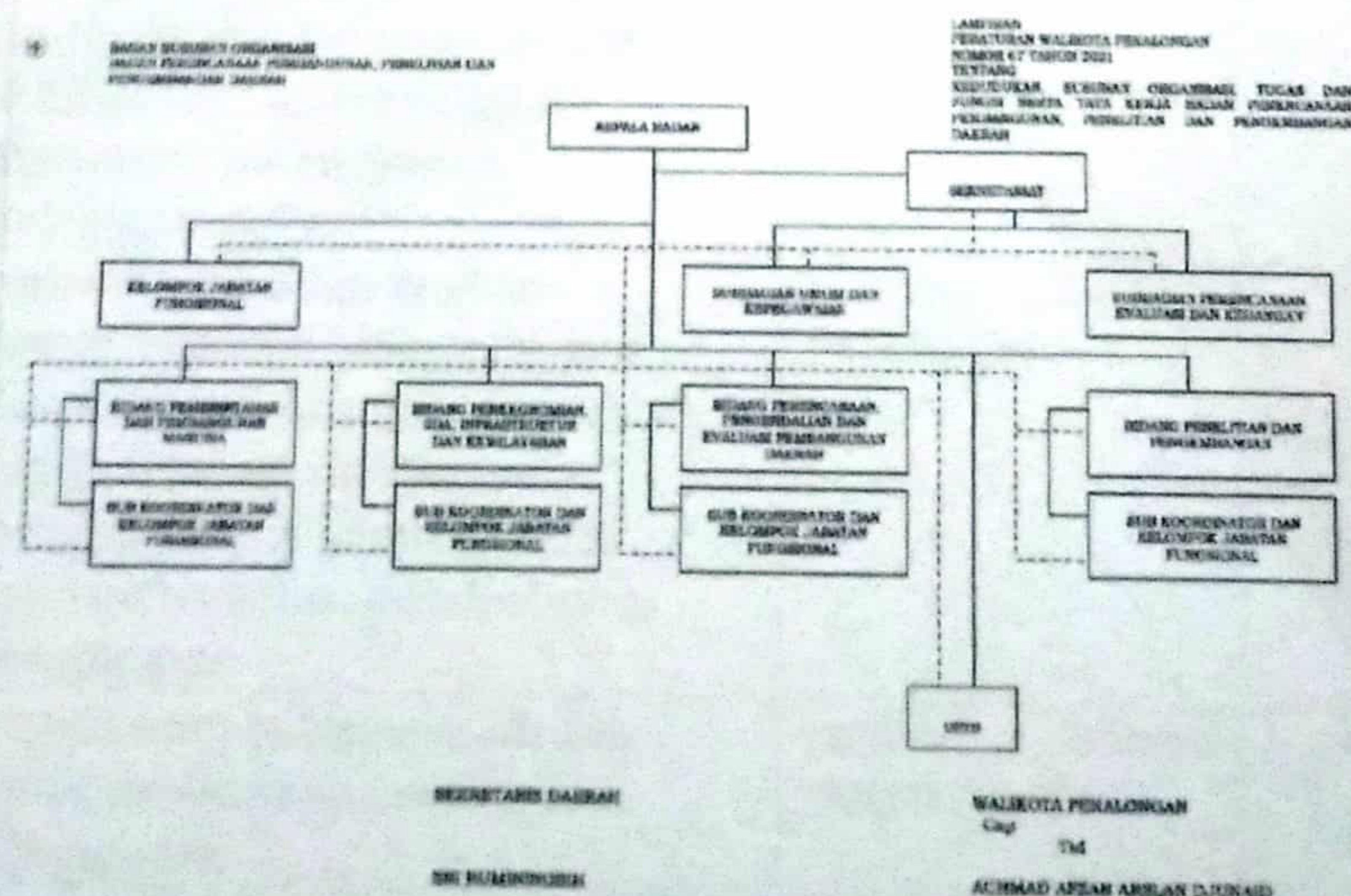
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana Ahli Madya mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
2. Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah;
3. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan; dan
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Ahli Madya
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah
2	Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan
4	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan III Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah	4	4	100
2	Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	4	4	100
3	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan	3	3	100
4	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	1	1	-
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan	4	4	100
Rata-rata Capaian						100

Hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Penyusunan rencana kegiatan telah memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan.
3. Ketersediaan SDM fungsional perencana sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

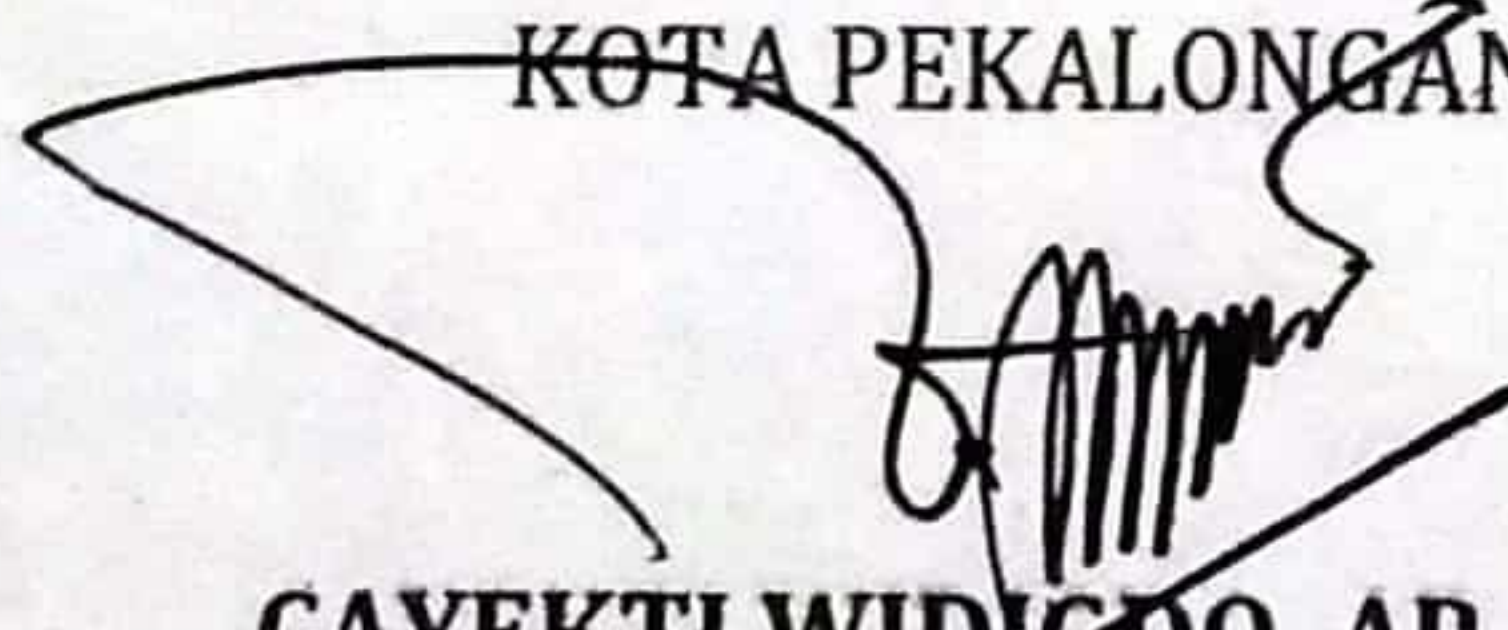
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN,



CAYEKTI WIDIGDO, AP. M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MADYA,



SLAMET MIFTAKHUDIN, ST
NIP. 19781222 200501 1 003

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

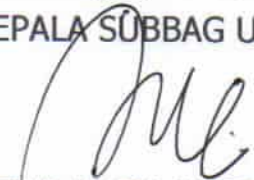
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DEWI HUSNULNIATY, S.Mn.

NIP. 19721128 199803 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
C Capaian Anggaran	9
BAB III PENUTUP	11
A Kesimpulan	11
B Rekomendasi	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3
TABEL 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	6
TABEL 2.3 Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023	6
TABEL 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023	9

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Pekalongan



Sumber : Peraturan Walikota Pekalongan No. 67 tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval Batik	1 kali
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
4	Tersedianya Peralatan dan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 unit

	Perlengkapan Kantor	yang diadakan	
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	20 unit
6	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan
8	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
10	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	400 orang/kali
11	Terkelolanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
12	Terkelolanya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
13	Terkelolanya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/ bahan kebersihan kantor	12 bulan
14	Terkelolanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan
15	Terkelolanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Acara Pekan Batik	1 kali	1	1	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit	6 unit	6 unit	100
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	20 unit	20 unit	20 unit	100
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	400 orang/kali	400 orang/kali	407 orang/kali	101,75
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
Rata-rata Capaian						100,12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100,12 % dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

Adapun faktor-faktor pendukung capaian kinerja antara lain :

1. Ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
2. Dukungan dan kerja sama yang baik dengan seluruh bidang di Bappeda, serta stake holder terkait.

C. Kinerja Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,-	2.400.000,-	2.155.000,-	89,79
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.658.000,-	224.658.000,-	214.708.000,-	95,57
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.914.000,-	2.914.000,-	2.746.500,-	94,25
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.473.000,-	55.473.000,-	55.473.000,-	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.876.000,-	13.876.000,-	13.875.900,-	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,-	2.500.000,-	2.495.000,-	99,80
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.744.000,-	450.744.000,-	433.566.063,-	96,19
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000,-	850.000,-	685.800,-	80,68

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000,-	68.400.000,-	63.776.439,-	93,24
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.020.000,-	90.020.000,-	89.926.076,-	99,90
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.200.000,-	81.200.000,-	69.835.090,-	86,00
13	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,-	20.200.000,-	16.340.000,-	80,89
	Total	1.018.235.000,-	1.018.235.000,-	970.582.868,-	
	Rata-rata Capaian				95,32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 95,32 % dengan kategori sangat tinggi/sangat berhasil.

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,32 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja triwulan IV sebesar 100,12 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,04 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan, secara keuangan sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya sehingga realisasi keuangan mencerminkan penggunaan anggaran sepenuhnya;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,12 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 95,32 %. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,04 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja dan keuangan kegiatan per triwulan agar selaras dan relevan dengan realisasi fisik dan keuangan pada triwulan/tahun berjalan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja program dan sasaran.

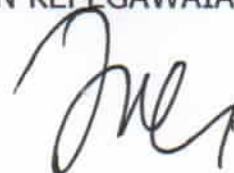
Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui
SEKRETARIS BAPPEDA



UJIANTO PURWANTO, S.SiT ,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790308 200502 1 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



DEWI HUSNULNIATY, S.Mn.
NIP. 19721128 199803 2 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

EVALUASI DAN KEUANGAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

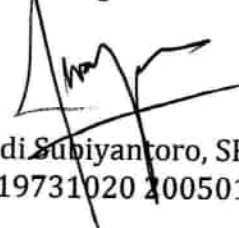
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Kasubbag Renvalkeu" Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Kasubbag Renvalkeu" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Kasubbag Renvalkeu" melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Kasubbag Renvalkeu



Wahyudi Subiyantoro, SPI.,MPA
NIP. 19731020 200501 1006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	6
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Renvalkeu Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Kasubbag Renvalkeu Triwulan IV Tahun 2023	5
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.....	6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Jabatan Kasubbag Renvalkeu	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

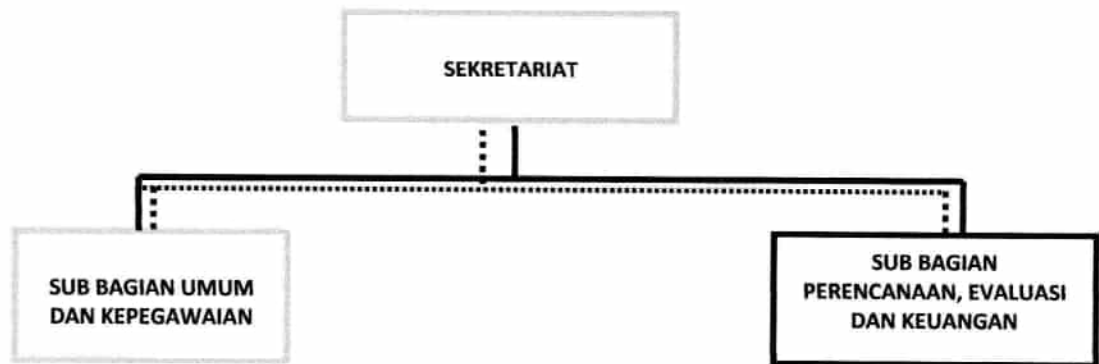
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, “Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan (Renvalkeu)” mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
4. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. melaksanakan fungsi akuntansi;
7. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
8. menyusun bahan profil perangkat daerah;
9. mengelola data dan informasi;
10. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
12. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Jabatan Kasubbag Renvalkeu



Sumber : Perwal Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan “Kasubbag Renvalkeu” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasubbag Renvalkeu
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dokumen
3	Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi PD	12 bulan
4	Tersusunnya dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5 dokumen
5	Tersusunnya dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen
6	Tersusunnya dokumen evaluasi renja	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen
7	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali
8	Tersedianya jasa administrasi	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	keuangan		
9	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Kasubbag Renvalkeu” Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Renvalkeu Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubbag Renvalkeu
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	2	2	100
2	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan yang disusun	2	1	1	100
3	Termonevnya Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring evaluasi PD	12	12	12	100
4	Tersusunnya dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5	5	5	100
5	Tersusunnya dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2	2	2	100
6	Tersusunnya dokumen evaluasi renja	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4	4	4	100
7	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	100
8	Tersediannya jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	12	12	100
9	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1	1	1	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag Renvalkeu adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat berhasil”.

Adapun faktor-faktor pendukung capain kinerja antara lain:

1. Ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
2. Dukungan dan Kerjasama yang baik dengan seluruh bidang di Bappeda, serta stake holder terkait.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,-	2.500.000,-	2.495.000,-	99,80
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	1.499.900,-	99,99
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,-	11.000.000,-	10.599.900,-	96,36
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.236.515.000,-	4.236.515.000,-	4.012.528.620,-	94,71
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.950.000,-	40.950.000,-	40.400.000,-	98,66
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	100
		4.294.165.000,-	4.294.165.000,-	4.069.223.420,-	94,76
Rata-rata Capaian					94,76

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 94,76 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,76 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,53 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Koordinasi dengan bidang-bidang di Bappeda dan stake holder terkait lebih intensif, sehingga perencanaan kinerja dan keuangan dapat lebih baik;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,76%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,53 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasubbag Renvalkeu Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 agar dapat dipertahankan dan bisa lebih ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya.
2. Evaluasi terhadap pagu anggaran, target kinerja dan keuangan sub kegiatan dilaksanakan dengan baik, agar capaian kinerja dan keuangan dapat lebih baik lagi.
3. Penetapan Indikator Kinerja Sub Kegiatan dievaluasi kembali agar dapat mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran.

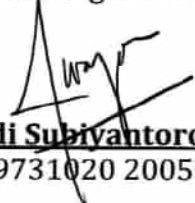
Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui
Sekretaris,



Ujianto Purwanto, SIT.,MSi
NIP. 19790308 200502 1 002

Kasubbag Renvalkeu,



Wahyudi Subiyantoro, SPi.,MPA
NIP. 19731020 200501 1006

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA


YOGI HARDIANTO, S.Kom, M.Sc

Pembina

NIP. 19860315 200902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	5
B. Struktur Jabatan.....	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	6
A. Perjanjian Kinerja.....	6
B. Capaian Kinerja.....	7
BAB III PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Rekomendasi.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023	6
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekalongan	5
--	---

BAB I PENDAHULUAN

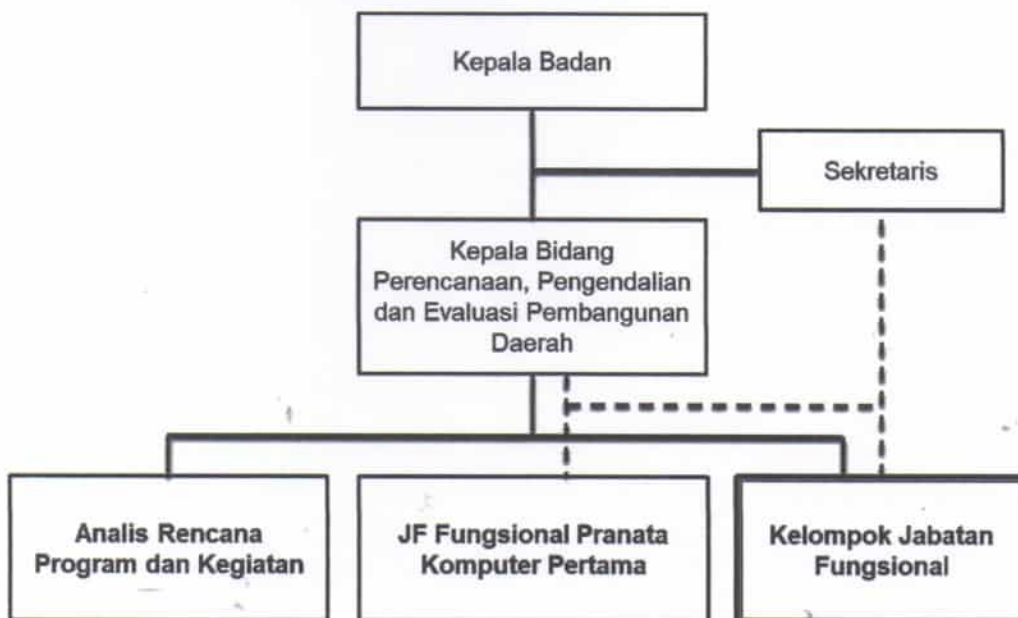
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas:

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan sebagaimana Gambar 1.1. dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekalongan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja
Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya dokumen background study RPJMD	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen
2	Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD 2023	Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun	1 dokumen
3	Tersusunnya dokumen Ranwal RKPD 2025	Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun	1 dokumen
4	Tersusunnya dokumen Ranwal RPJPD	Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun	1 dokumen
5	Tersusunnya dokumen RKPD 2024	Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun	1 dokumen
6	Meningkatnya kapasitas sumber data manusia bidang perencanaan pembangunan	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	1 kegiatan
7	Terselenggaranya pertemuan Bappeda se-Jawa Tengah	Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	1 kegiatan
8	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen
9	Tersusunnya dokumen evaluasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025	Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 - 2025 yang disusun	1 dokumen
10	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen
11	Terselenggaranya kegiatan refleksi kinerja KDH	Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan	1 kali
12	Tersusunnya dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1 dokumen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / cukup berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / tidak berhasil
0 s.d. 50	Sangat rendah / sangat tidak berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 - 2025 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100
		Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	100
3	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
Rata-rata capaian						100

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dijadwalkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai jadwal, menjadi faktor keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pekerjaan.
3. Dukungan internal instansi dan kebijakan pimpinan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

B. Rekomendasi

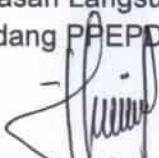
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan;
2. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pekerjaan agar tercapai tepat waktu.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Fungsional Perencana Ahli Muda

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Bidang PPEPD Bappeda,


MUHAMMAD HARJO, S.Kom, M.Ak
NIP. 19800528 200501 1 007


YOGI HARDIANTO, S.Kom, M.Sc
NIP. 19860315 200902 1 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
"FUNGSIONAL PERENCANA MUDA"



TRI PUJI ASTUTI, ST., M.Eng.
NIP. 19800219 200604 2 009

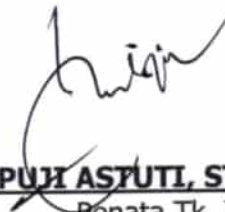
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Muda Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong meningkatkan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Fungsional Perencana Muda melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024
Fungsional Perencana Muda



TRI PUJI ASTUTI, ST., M.Eng.

Penata Tk. I

NIP. 19800219 200604 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Jabatan	1
B. Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Muda Tahun 2023	2
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Muda Triwulan IV Tahun 2023	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional Tahun 2023	1
------------	--	---

BAB I

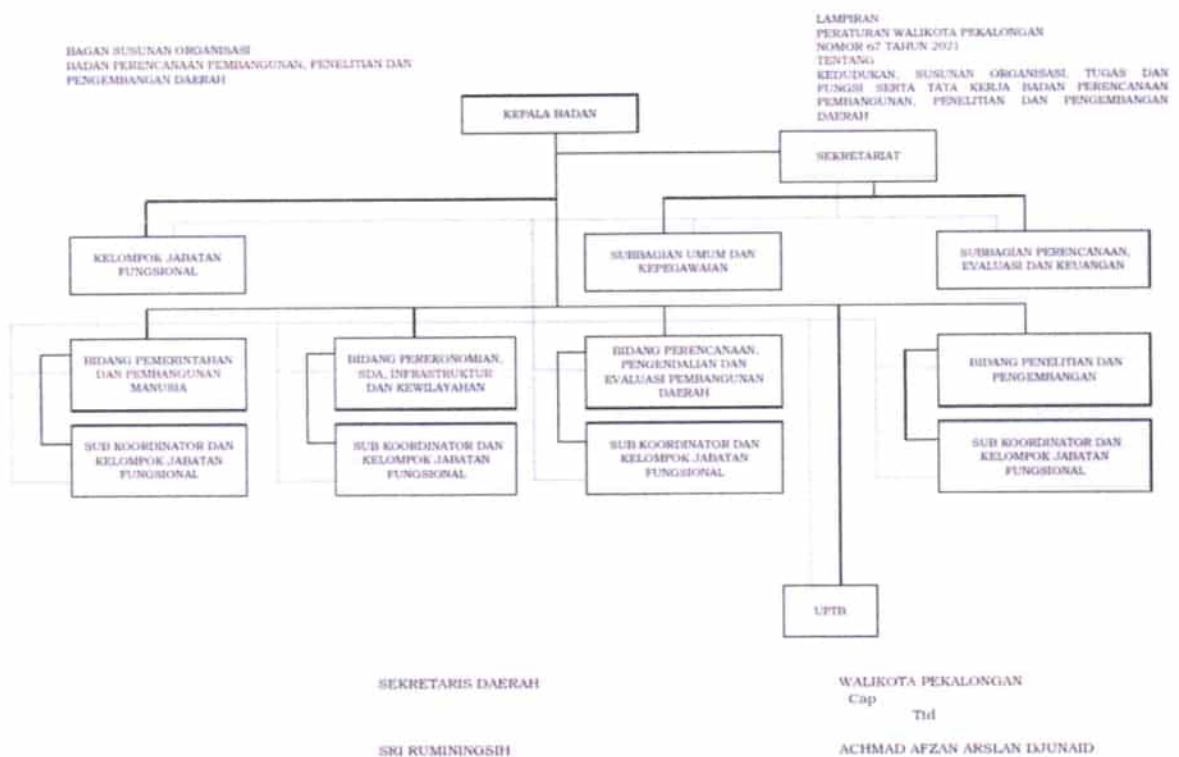
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Kelompok Jabatan Fungsional ditunjukkan sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Muda Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyajikan data dan informasi.	Jumlah data yang tersedia	33 laporan
2	Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	7 laporan
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral / regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.	Jumlah laporan yang tersusun	2 laporan
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah laporan yang tersusun	13 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Muda Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Muda Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Muda
Triwulan IV Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyajikan data dan informasi.	Jumlah data yang tersedia	33 laporan	33	33	100,00
2	Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	7 laporan	7	7	100,00
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral / regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.	Jumlah laporan yang tersusun	2 laporan	2	2	100,00
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah laporan yang tersusun	13 laporan	13	13	100,00
Rata-Rata Capaian						100,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Fungsional Perencana Muda adalah sebesar 100,00 % dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Penyusunan rencana kegiatan telah memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan.
3. Ketersediaan SDM fungsional perencana sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Muda adalah sebesar 100,00 % dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Perencana Muda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan indikator kinerja kegiatan mendukung dan selaras dengan indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui,

KABID PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Rr. MURNI INDAH WIJAYANTI, S.K.M., M.Si.

NIP. 19810312 200501 2 012

FUNGSIONAL PERENCANA MUDA



TRI PUJI ASTUTI, ST., M.Eng.

NIP. 19800219 200604 2 009

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024
Fungsional Perencana Ahli Muda

DIAH WAHYUNINGRUM, ST
Penata
NIP. 19841117 201502 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A Tugas Jabatan 1

 B Struktur Jabatan 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 2

 A Perjanjian Kinerja 2

 B Capaian Kinerja 2

BAB III PENUTUP 5

 A Kesimpulan 5

 B Rekomendasi 5

BAB I

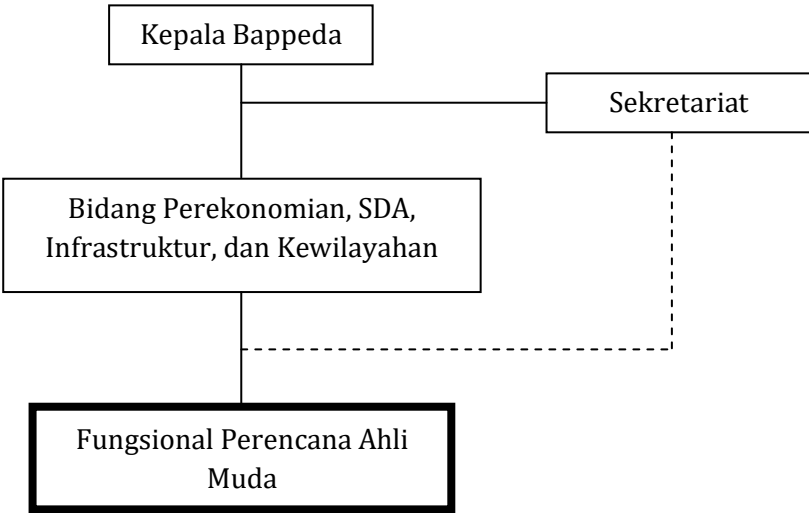
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

- Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
 2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 5. Menguji alternatif kriteria dan model;
 6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
3	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian sistem drainase Kota Pekalongan yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
4	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang kewilayahan yang transparan dan akuntabel	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	yang mendukung perencanaan pembangunan daerah					
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian sistem drainase Kota Pekalongan yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang kewilayahan yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Rata-rata Capaian					100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan IV adalah 4 (satu) dokumen dengan realisasi sebesar 100%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur,
dan Kewilayahan,

Fungsional Perencana Ahli Muda,

IMRON ROSYIDI, S.Pi., M. App., Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

DIAH WAHYUNINGRUM, ST
NIP. 19841117 201502 2 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Fungsional Perencana Ahli Muda



HERLAMBAng DWI ANGGARA, SE., MAP

Penata

NIP. 19850326 200902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A Tugas Jabatan 1

 B Struktur Jabatan 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 2

 A Perjanjian Kinerja 2

 B Capaian Kinerja 2

BAB III PENUTUP 4

 A Kesimpulan 4

 B Rekomendasi 4

BAB I

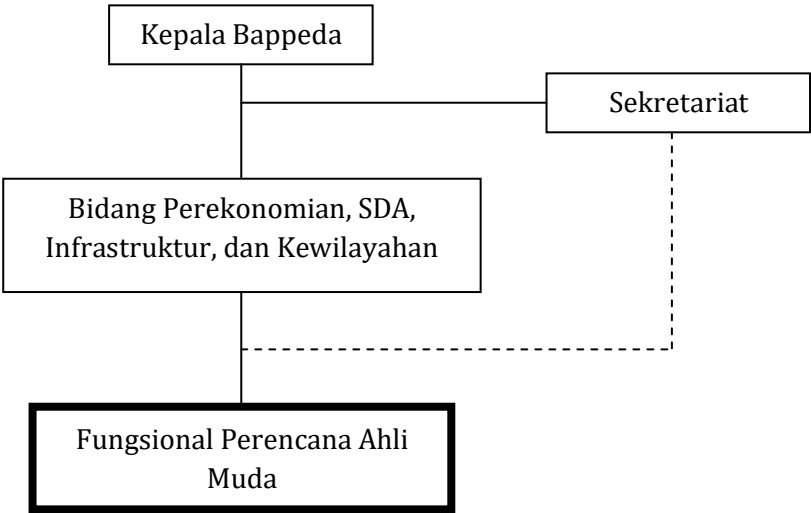
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

- Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
 2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 5. Menguji alternatif kriteria dan model;
 6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian yang transparan dan akuntabel	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Rata-rata Capaian					100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan IV adalah 1 (satu) dokumen sedangkan realisasinya sebesar 100%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 02 Januari 2024
Mengetahui

Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur,
dan Kewilayahan,

Fungsional Perencana Ahli Muda,



IMRON ROSYIDI, S.Pi., M. App., Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003



HERLAMBAH DWI ANGGARA, SE., MAP
NIP. 19850326 200902 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
"ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN"



**"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH"**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" melalui pelaksanaan tugas dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

"Analisis Rencana Program dan Kegiatan"



"Aulia Nailufar, SE"

Penata Muda Tk. I

NIP. 19861001 201903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 86 Tahun 2022 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas,
3. Melaksanakan kajian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan "Analisis Rencana Program dan Kegiatan", sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun	14 dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah bahan laporan yang tersedia	14 dokumen
3	Melaksanakan kajian perencanaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 kegiatan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	pembangunan daerah berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan		
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 dokumen
5	Menyusun saran/rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	1 file/berkas

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan” Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan”

Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan obyek kerja dalam	Jumlah bahan laporan yang tersedia	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
	bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas					
3	Melaksanakan kajian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%
5	Menyusun saran/rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	1 file/berkas	1 file/berkas	1 file/berkas	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori "sangat berhasil", adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya Kerjasama yang baik dengan bidang -bidang terkait, terutama dalam pemenuhan dokumen/data OPD yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-update peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
Kabid PPEPD ,

"Muhammad Harjo, S.Kom, M.Ak."

NIP. 19800528 200501 1 007

"Analisis Rencana Program dan Kegiatan",

"Aulia Nailufar, SE"

NIP. 19861001 201903 2 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
ANALIS INFRASTRUKTUR



Surya Murdani
NIP. 19861129 201903 1 002

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perencanaan Triwulan IV Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Perencanaan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Analis Perencanaan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Analisis Infrastruktur



Surya Murdani, ST.

(Penata Muda)

NIP. 19861129 201903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Analisis Infrastruktur Tahun 2023	2
Tabel 2.2.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2.3.	Pengukuran Kinerja Analisis Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 B Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Analisis Infrastruktur pada Sub Bagian Infrastruktur mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analis Infrastruktur, sebagaimana gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Infrastruktur pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis infrasturktur pada
Sub Bidang Infrastruktur
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Jumlah bahan data yang tersusun	10 dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah bahan dokumen yang tersedia	10 dokumen
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Jumlah bahan dokumen yang tersusun dan tersedia	10 dokumen
4	Menyusun Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;	Jumlah bahan dokumen yang tersusun dan tersedia	3 laporan
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan dokumen yang tersusun dan tersedia	3 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Infrastruktur pada
Triwulan IV Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah bahan data yang tersusun	10 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	50%
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah telaah bahan dokumen yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	100%
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah kajian dokumen yang tersusun dan tersedia	10 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	100%

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
4	Menyusun Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja yang tersusun dan tersedia	3 laporan	2 laporan	3 laporan	100%
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen rekomendasi yang tersusun dan tersedia	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	100%
Rata-rata Capaian						100%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Analis Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023, adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

Mengetahui
Kepala Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan,



IMRON ROSYIDI, S.Pi., M.App.Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

Analisis Infrastruktur,



SURYA MURDANI, ST
NIP. 19861129 201903 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
"PENELITI AHLI PERTAMA"



**"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"**

TAHUN 2023

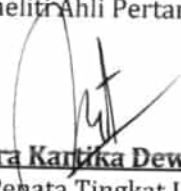
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Peneliti Ahli Pertama" Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Peneliti Ahli Pertama" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Peneliti Ahli Pertama" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2023

"Peneliti Ahli Pertama"



"Mutiara Kartika Dewi, ST."

Pegawai Tingkat I

NIP. 19780923 201101 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pelaksana.....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pelaksana	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Peneliti Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)
2. Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang
3. Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama
4. Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan
5. Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
6. Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
7. melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)
8. Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)
9. Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi
10. Mempersiapkan sosialisasi (HKI)
11. Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan "Peneliti Ahli Pertama", sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja "Peneliti Ahli Pertama" Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Hasil Penelitian Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Peneliti Ahli Pertama”
Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD	8	8	100%
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.	6	6	100%
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama	2	2	100%
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali	3	3	100%
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali	4	4	100%
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI	1	1	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen	1	1	100%
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen	1	1	100%
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen	1	1	100%
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	1	1	100%
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali	1	1	100%
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa rata-rata capaian 100% dengan kategori “sangat berhasil”, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (Perguruan Tinggi dan OPD), terutama dalam pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-*update* peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Peneliti Ahli Pertama" adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi"

B. Rekomendasi

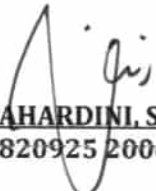
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Peneliti Ahli Pertama" Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja per triwulan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Penetapan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja organisasi

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui

KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
NIP. 19820925 200604 2 009

PENELITI AHLI PERTAMA


MUTIARA KARTIKA DEWI, ST
NIP. 19780923 201101 2 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
"PENELITI AHLI PERTAMA"



**"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Peneliti Ahli Pertama" Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Peneliti Ahli Pertama" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Peneliti Ahli Pertama" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

"Peneliti Ahli Pertama"



"Amalia Ida Gunawati, ST."

Penata Tingkat I

NIP. 19860113 201502 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pelaksana.....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pelaksana	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Peneliti Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)
2. Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang
3. Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama
4. Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan
5. Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
6. Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
7. melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)
8. Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)
9. Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi
10. Mempersiapkan sosialisasi (HKI)
11. Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Peneliti Ahli Pertama”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Hasil Penelitian Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Peneliti Ahli Pertama”
Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD	8	8	100%
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.	6	6	100%
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama	2	2	100%
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali	3	3	100%
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali	4	4	100%
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI	1	1	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen	1	1	100%
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen	1	1	100%
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen	1	1	100%
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	1	1	100%
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali	1	1	100%
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa rata-rata capaian 100% dengan kategori “sangat berhasil”, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (Perguruan Tinggi dan OPD), terutama dalam pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-*update* peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

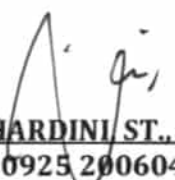
1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja per triwulan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Penetapan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja organisasi

Pekalongan, 2 Januari 2023

Mengetahui

KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PENELITI AHLI PERTAMA


SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
NIP. 19820925 200604 2 009


AMALIA IDA GUNAWATI, ST
NIP. 19860113 201502 2 001

**LAPORAN KINERJA
ANALIS PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
TRIWULAN IV TAHUN 2023**



**BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada khususnya bahwa Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan pada Triwulan IV Tahun 2023 melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

ANALIS PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



AYU CAHYANING KESUMA, SE.

Penata Muda

NIP. 19960101 202012 2 034

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Jabatan	1
B. Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A. Perjanjian Kinerja	4
B. Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Rekomendasi	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023	4
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan IV Tahun 2023	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

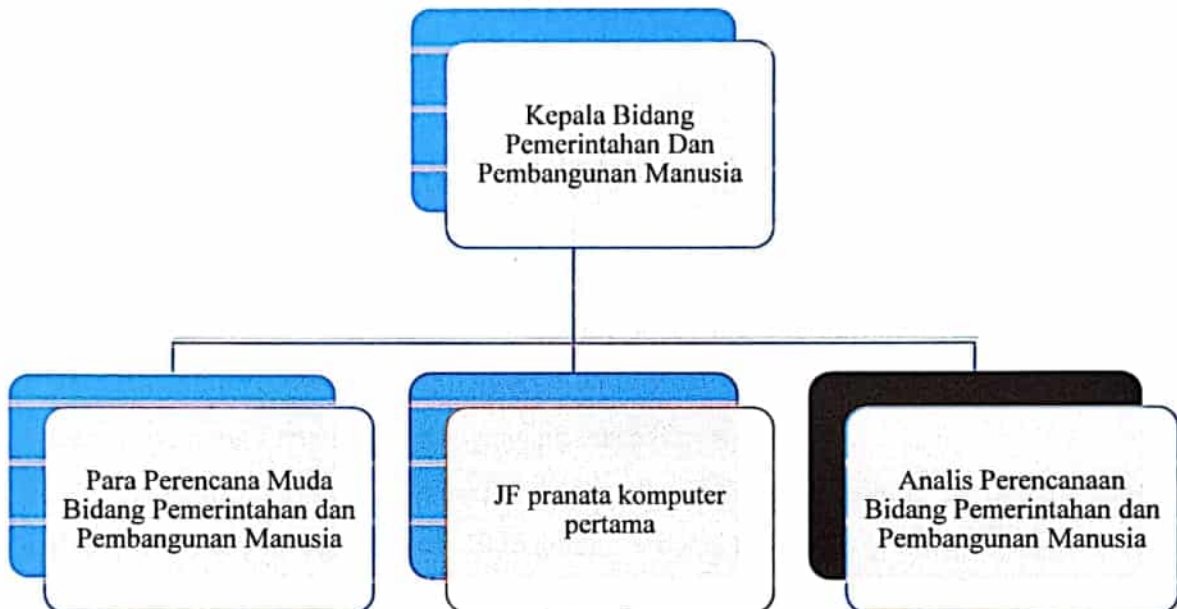
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan;
2. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan;
4. Tersusunnya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analisis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pekalongan**



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan	Dokumen	1 Dokumen
2	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Laporan	1 Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	Kali	1 Kali
4	Tersusunnya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Dokumen	1 Dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analisis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Tersusunnya dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%
4	Tersusunnya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori "sangat berhasil". Adapun factor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak baik internal maupun eksternal dalam pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan oleh Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-update peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, adalah sebesar (100%).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui :

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



Rr. Murni Indah Wijayanti, S.KM., M.Si
NIP. 19810312 200501 2 012

ANALIS PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA



Ayu Cahyaning Kesuma, SE.
NIP. 19960101 202012 2 034

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024
JF Pranata Komputer Pertama



Danang Seno Aji, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19911209 202012 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok.....	1
B. Struktur Jabatan.....	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kerja.....	2
B. Capaian Kinerja.....	2
BAB III PENUTUP	4
A. Kesimpulan	4
B. Rekomendasi.....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023	2
Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, JF Pranata Komputer Pertama mempunyai uraian tugas jabatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan draft dokumen laporan Data Prioritas Satu Data Terpadu Daerah
2. Melaksanakan pengolahan data form penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah
3. Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi Cascading Kinerja secara rutin

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Pranata Komputer Pertama sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer
Pertama Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan penyusunan draft dokumen laporan Data Prioritas Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah draft dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	1 dokumen
2.	Melaksanakan pengolahan data form penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah Data Penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah yang diolah	39 dokumen
3.	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi Cascading Kinerja secara rutin	Jumlah data yang dibackup/ dipulihkan	52 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Melaksanakan penyusunan draft dokumen laporan Data Prioritas Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah draft dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	1 dokumen	1	1	100
2	Melaksanakan pengolahan data form penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah Data Penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah yang diolah	39 dokumen	39	39	100
3	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi Cascading Kinerja secara rutin	Jumlah data yang dibackup/ dipulihkan	52 dokumen	13	13	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama pada triwulan ketiga ini adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya:

1. Dukungan dari atasan yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
3. Kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan;
2. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Bidang PPEPD,



Muhammad Harjo, S.Kom., M.Ak
NIP. 19800528 200501 1 007

JF Pranata Komputer Pertama,



Danang Seno Aji, S.Kom
NIP. 19911209 202012 1 011

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA



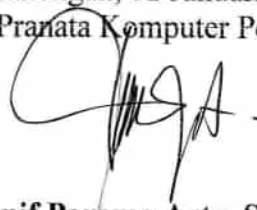
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024
JF Pranata Komputer Pertama



Hanif Parama Arta, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19940423 202012 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok.....	1
B. Struktur Jabatan.....	1
BAB II	2
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kerja.....	2
B. Capaian Kinerja.....	3
BAB III	5
PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Rekomendasi.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023	2
Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Pranata Komputer, JF Pranata Komputer Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
2. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI
3. Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout
4. Melakukan Backup dan Pemulihan Data
5. Melakukan Manipulasi Data
6. Melakukan Pengumpulan Kebutuhan Informasi Data

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Pranata Komputer Pertama sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer
Pertama Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	1 Kegiatan
3.	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	1 Laporan
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kali
5.	Terlaksananya instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan instalasi dan konfigurasi sistem informasi/aplikasi	6 Laporan
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Infrastruktur TI yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen kegiatan perawatan	12 Dokumen
7.	Terfasilitasinya Video Conference(Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan Video Conference (vicon)	28 Laporan
8.	Terlaksananya Backup dan Pemulihan Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen hasil backup atau pemulihan data	12 Dokumen
9.	Terlaksananya Manipulasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan manipulasi data	18 Laporan
10.	Terlaksananya Pengumpulan Kebutuhan Informasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Kebutuhan Informasi	24 Dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama
Triwulan IV Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya dokumen koordinasi pembangunan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan disusun	1 Dokumen	0	0	0

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1	1	1
3.	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	1 Laporan	1	1	1
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kali	1	1	1
5.	Terlaksananya instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan instalasi dan konfigurasi sistem informasi/aplikasi	6 Laporan	1	1	100
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Infrastruktur TI yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen kegiatan perawatan	12 Dokumen	3	3	100
7.	Terfasilitasinya Video Conference(Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan Video Conference (vicon)	28 Laporan	7	7	100
8.	Terlaksananya Backup dan Pemulihan Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen hasil backup atau pemulihan data	12 Dokumen	3	3	100
9.	Terlaksananya Manipulasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan manipulasi data	18 Laporan	4	4	100
10.	Terlaksananya Pengumpulan Kebutuhan Informasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Kebutuhan Informasi	24 Dokumen	6	6	100
Rata-Rata Capaian						98%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama pada triwulan ketiga ini adalah sebesar 98 % dengan kategori tinggi/ berhasil.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan kegiatan yang terdapat pada bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dan kegiatan butir-butir pranata komputer yang saling bersinergi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama adalah sebesar 98 % dengan kategori Tinggi/ Berhasil

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan
2. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya

Mengetahui
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



Rr. Murni Indah Wijayanti, S.K.M., M.Si
NIP. 19810312 200501 2 012

Pekalongan, 02 Januari- 2024

JF Pranata Komputer Pertama,



Hanif Parama Arta, S.Kom
NIP. 19940423 202012 1 012

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024
Pranata Komputer Ahli Pertama



AHSANUL FIKRI, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19950416 202012 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB III PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok	1
B. Struktur Jabatan	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	4
A. Perjanjian Kerja	4
B. Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Rekomendasi	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	3
---------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2023	4
Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2023....	5

BAB III

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

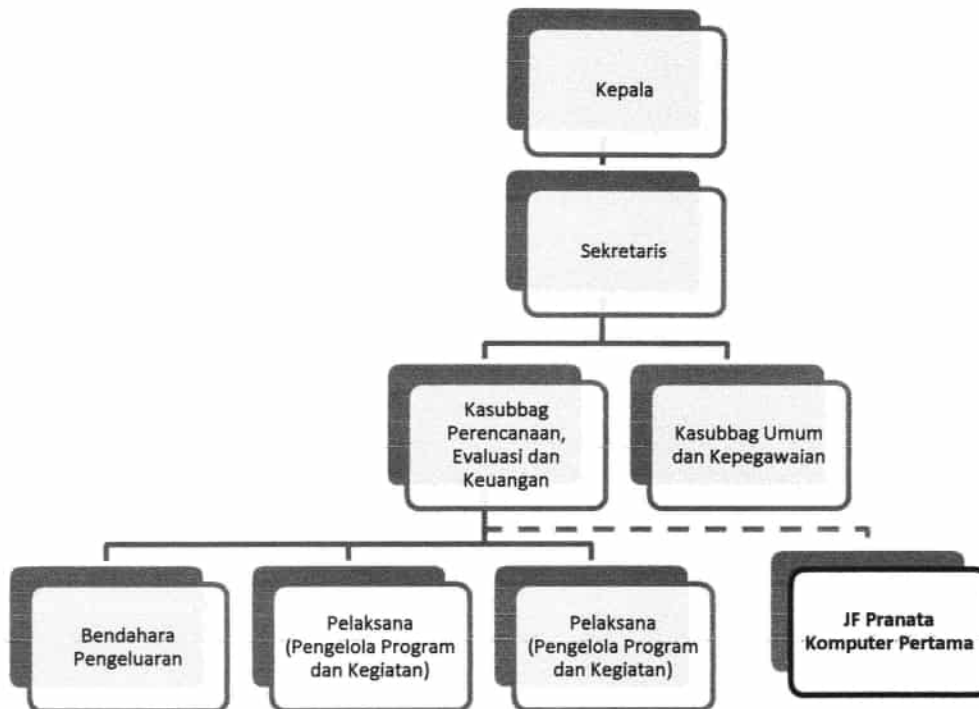
1. Mengelola katalog layanan teknologi informasi
2. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi
3. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data
4. Melakukan implementasi data model
5. Melakukan implementasi business intelligence
6. Menyusun taksonomi data
7. Menyusun arsitektur data
8. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi
9. Melakukan perancangan layanan akses data
10. Melakukan implementasi rancangan layanan akses data
11. Melakukan ingestion data
12. Melakukan implementasi rancangan integrasi data
13. Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data
14. Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi
15. Melakukan validasi kebutuhan informasi
16. Menyusun dokumentasi rancangan database
17. Melakukan instalasi dan konfigurasi DBMS
18. Melakukan backup atau pemulihan data
19. Menyusun tingkat kinerja layanan database
20. Melakukan peningkatan kinerja database
21. Menyusun rencana retensi data
22. Melakukan evaluasi teknologi data
23. Melakukan pengadministrasian teknologi data
24. Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data
25. Mengelola pengguna dan hak akses data
26. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi
27. Melakukan pengumpulan data audit TI menggunakan metode tertentu
28. Menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks
29. Menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks
30. Menyusun prosedur pemanfaatan sistem jaringan
31. Melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks
32. Melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana
33. Menyusun dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer
34. Melakukan optimalisasi sistem jaringan

35. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks
36. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Infrastruktur TI dengan spesifikasi teknis
37. Melakukan pengujian infrastruktur TI
38. Melakukan pemeliharaan infrastruktur TI
39. Melakukan pemasangan infrastruktur TI
40. Melakukan pengaturan akses keamanan fisik TI
41. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur TI
42. "Menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur TI"
43. Menyiapkan peralatan video conference (vicon /streaming), monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), mengatur layout
44. Melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur TI
45. Melakukan perancangan sistem informasi
46. Membuat program aplikasi sistem informasi
47. Mengembangkan program aplikasi sistem informasi
48. Melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi
49. Melakukan uji coba sistem informasi
50. Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi
51. Menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi
52. Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi
53. Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
54. Melakukan data crawling, data feeding, data loading
55. Melakukan manipulasi data
56. Menyusun definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial
57. Membuat peta tematik rinci
58. Melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci
59. Mengoperasikan tools untuk membuat storyboard
60. Membuat flowchart untuk pemrograman multimedia
61. Melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak
62. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak
63. Membuat prototype kompleks pada program multimedia
64. Membuat program multimedia kompleks

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi SIM-UMK	Jumlah dokumentasi hasil pengembangan program aplikasi sistem informasi	18 dokumen
2	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi SIM-UMK secara rutin	Jumlah dokumen hasil backup atau pemulihan data	52 dokumen
3	Menyediakan SPP beserta kelengkapannya yang terdiri dari SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang akuntabel	Jumlah dokumen SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang dibuat	80 dokumen
4	Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD	Jumlah rekonsiliasi keuangan yang dilaksanakan	4 kali
5	Melaksanakan input dokumen penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen yang diInput ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1500 dokumen
6	Menyediakan draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang akuntabel	Jumlah draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	4 dokumen
7	Melaksanakan Validasi Kebutuhan Informasi data SDTD	Jumlah Dokumen hasil validasi kebutuhan informasi data SDTD	1 dokumen
8	Melaksanakan pembuatan Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak	Jumlah Dokumen obyek multimedia kompleks	12 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Melaksanakan Pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi SIM-UMK	Jumlah dokumentasi hasil pengembangan program aplikasi sistem informasi	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100,00%
2	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi SIM-	Jumlah dokumen hasil backup atau pemulihan data	52 dokumen	52 dokumen	52 dokumen	100,00%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	UMK secara rutin					
3	Menyediakan SPP beserta kelengkapannya yang terdiri dari SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang akuntabel	Jumlah dokumen SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang dibuat	80 dokumen	80 dokumen	86 dokumen	107,50%
4	Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD	Jumlah rekonsiliasi keuangan yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4 kali	100,00%
5	Melaksanakan input dokumen penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen yang diinput ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1500 dokumen	1500 dokumen	1600 dokumen	106,67%
6	Menyediakan draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang akuntabel	Jumlah draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
7	Melaksanakan Validasi Kebutuhan Informasi data SDTD	Jumlah Dokumen hasil validasi kebutuhan informasi data SDTD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
8	Melaksanakan pembuatan Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak	Jumlah Dokumen obyek multimedia kompleks	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
Rata-rata Capaian						101,77%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama pada triwulan pertama ini adalah sebesar 106,17% dengan kategori sangat

tinggi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama, antara lain:

1. Kemampuan teknis: Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan program aplikasi, backup dan pemulihan data, serta pembuatan obyek multimedia. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Ketersediaan sumber daya: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai seperti perangkat lunak, perangkat keras, serta data dan informasi yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya yang memadai memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan standar: Pranata Komputer Ahli Pertama patuh terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh instansi atau SKPD. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Motivasi dan komitmen: Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki motivasi yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dengan baik. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Dukungan dari atasan dan rekan kerja: Pranata Komputer Ahli Pertama mendapatkan dukungan yang memadai dari atasan dan rekan kerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dukungan tersebut dapat berupa bimbingan, arahan, maupun kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 101,77% dengan kategori Sangat Tinggi

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan
2. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan,



Wahyudi Suhiantoro, S.Pi.,MPA

NIP. 19731020 200501 1 006

Pranata Komputer Ahli Pertama,



Ahsanul Fikri, S.Kom

NIP. 19950416 202012 1 015

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**



PERMADANI FITRI APRILLIA, S.E
NIP. 19910415 202012 2 019

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran



Permadani Fitri Aprillia, S.E

NIP. 19910415 202012 2 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	IVi
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB IVI PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Gambar	1
----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 86 Tahun 2022 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
6. Menyusun Kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diperiksa	5 dokumen
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diklasifikasikan	5 dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan obyek yang dipelajari	5 dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah konsep obyek yang disusun	5 dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja	Jumlah konsep obyek yang didiskusikan	5 dokumen
6	Menyusun Kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja	Jumlah obyek yang disusun kembali	5 dokumen
7	Mengevaluasi proses penyusunan	Jumlah obyek yang	5 dokumen

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	dievaluasi	
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah bulan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	12 bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diperiksa	5 dokumen	5	5	100%
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diklasifikasikan	5 dokumen	5	5	100%
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan obyek yang dipelajari	5 dokumen	5	5	100%
4	Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah konsep obyek yang disusun	5 dokumen	5	5	100%
5	Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja	Jumlah konsep obyek yang didiskusikan	5 dokumen	5	5	100%
6	Menyusun Kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja	Jumlah obyek yang disusun kembali	5 dokumen	5	5	100%
7	Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan	Jumlah obyek yang dievaluasi	5 dokumen	5	5	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
	kesempurnaan tercapainya sasaran					
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah bulan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori "sangat berhasil", adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya Kerjasama yang baik dengan bidang -bidang terkait, terutama dalam pemenuhan dokumen/data OPD yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal
3. Selalu meng-update peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB IVI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

Atasan Langsung
Kabid PPEPD,



Muhammad Harjo, S.Kom., M.Ak.
NIP. 19800528 200501 1 007

Penyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran,



Permadani Fitri Aprillia, S.E
NIP. 19910415 202012 2 019

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023

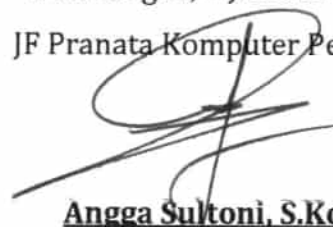
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

JF Pranata Komputer Pertama



Angga Sultoni, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19891104 202012 1 010

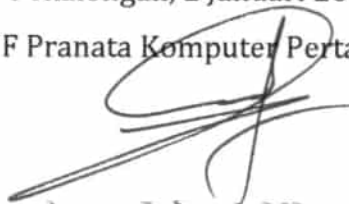
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

JF Pranata Komputer Pertama



Angga Sultoni, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19891104 202012 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023.....	2
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	1
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

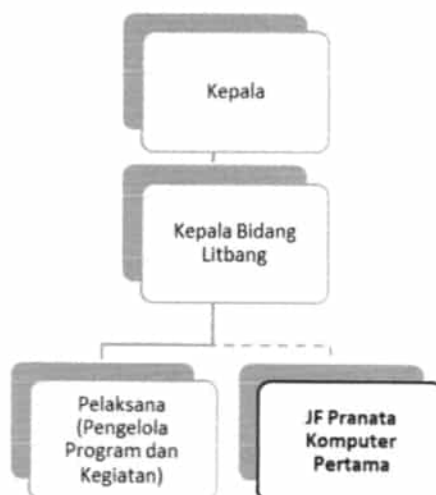
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, JF Pranata Komputer Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan program aplikasi sistem informasi
2. Melakukan Backup Atau Pemulihan Data
3. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI
4. Melakukan Pemasangan Infrastruktur TI
5. Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Terhadap Permasalahan Infrastruktur TI
6. Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout
7. Melakukan validasi kebutuhan informasi
8. Melakukan Manipulasi data
9. Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi
10. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi
11. Mengelola pengguna dan hak akses data

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Pranata Komputer Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama
Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	5 dokumen
2	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen/laporan video conference RUD	3 dokumen
3	Melaksanakan pengelolaan pengguna dan hak akses data pada website jurnal	jumlah dokumen user baru yang dikelola pada aplikasi website jurnal	2 dokumen
4	Melaksanakan backup atau pemulihan data pada website jurnal secara rutin	Jumlah dokumen/file hasil backup dan pemulihan data	12 dokumen
5	Mengelola Aplikasi Website Kelitbangan secara Optimal	Jumlah dokumen permohonan Surat Keterangan Penelitian yang diverifikasi dan atau validasi	300 dokumen
6	Mengelola Aplikasi Website Jurnal secara Optimal	Jumlah dokumen artikel yang diterbitkan pada aplikasi website	10 dokumen

		jurnal	
7	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	10 dokumen
8	Memfasilitasi video conference pelaksanaan kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah dokumen/laporan video conference kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	3 dokumen
9	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen kebutuhan informasi yang disediakan	3 dokumen
10	Menyediakan Editing Obyek Multimedia Kompleks Dengan Piranti Lunak dalam proses pelaksanaan kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen Obyek Multimedia yang disediakan	1 dokumen
11	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen/laporan video conference Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	3 dok/laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	5 dokumen	5	5	100%
2	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen/laporan video conference RUD	3 dokumen	3	3	100%
3	Melaksanakan pengelolaan pengguna dan hak akses data pada website jurnal	jumlah dokumen user baru yang dikelola pada aplikasi website jurnal	2 dokumen	2	2	100%
4	Melaksanakan backup atau pemulihan data pada website jurnal secara rutin	Jumlah dokumen/file hasil backup dan pemulihan data	12 dokumen	12	12	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
5	Mengelola Aplikasi Website Kelitbangan secara Optimal	Jumlah dokumen permohonan Surat Keterangan Penelitian yang diverifikasi dan/atau validasi	300 dokumen	300	300	100%
6	Mengelola Aplikasi Website Jurnal secara Optimal	Jumlah dokumen artikel yang diterbitkan pada aplikasi website jurnal	10 dokumen	10	10	100%
7	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	10 dokumen	10	8	80,00%
8	Memfasilitasi video conference pelaksanaan kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah dokumen/laporan video conference kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	3 dokumen	3	2	66,67%
9	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen kebutuhan informasi yang disediakan	3 dokumen	3	3	100%
10	Menyediakan Editing Obyek Multimedia Kompleks Dengan Piranti Lunak dalam proses pelaksanaan kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya	Jumlah dokumen Obyek Multimedia yang disediakan	1 dokumen	1	1	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
	sosialisasi HKI					
11	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen/laporan video conference Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	3 dok/laporan	3	3	100%
	Rata-rata Capaian					99,14 %

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama adalah sebesar 99,14 % dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi

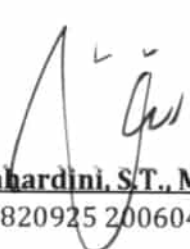
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Pranata Komputer Pertama Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan.
- b. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG KEPALA BIDANG
LITBANG


Sevina Mahardini, S.T., M.T., M.Sc.
NIP. 19820925 200604 2 009

JF Pranata Komputer Pertama



Angga Sultoni, S.Kom
NIP. 19891104 202012 1 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
AHLI PERTAMA PERENCANA



Lena Juliana Mardiyana, S.E.
NIP. 19980702 202203 2 018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Ahli Pertama Perencana Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Ahli Pertama Perencana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Ahli Pertama Perencana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Ahli Pertama Perencana



Lena Juliana Mardiyana, S.E.

(Penata Muda)

NIP. 19980702 202203 2 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

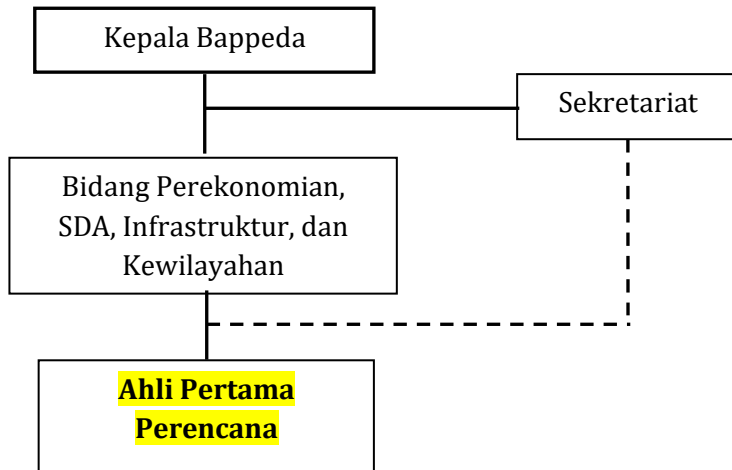
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Ahli Pertama Perencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Permasalahan
2. Merumuskan Permasalahan
3. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder
4. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer
5. Mengolah Data dan Informasi
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data
7. Menganalisis Data dan Informasi
8. Menyajikan Data dan Informas
9. Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
10. Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan
11. Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Ahli Pertama Perencana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Infrastruktur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Ahli Pertama Perencana pada
Sub Bidang Infrastruktur
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Ahli Pertama Perencana
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
<i>Rata-rata Capaian</i>						100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan IV adalah 4 (satu) dokumen dengan realisasi sebesar 100%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Infrastruktur Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui

Mengetahui
Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan
Infrastruktur Wilayah,



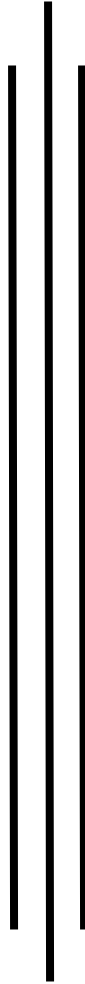
IMRON ROSYIDI, S. Pi. M. App. Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

Ahli Pertama Perencana,



LENA JULIANA MARDIYANA, S.E.
NIP. 19980702 202203 2 018

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
AHLI PERTAMA PERENCANA



Rolan Firmanasari
NIP. 19890720 202203 2 007

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

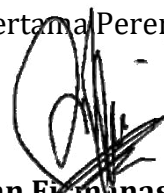
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Ahli Pertama Perencana Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Ahli Pertama Perencana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Ahli Pertama Perencana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Ahli Pertama Perencana



Rolan Firmansari

(Penata Muda)

NIP. 19890720 202203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

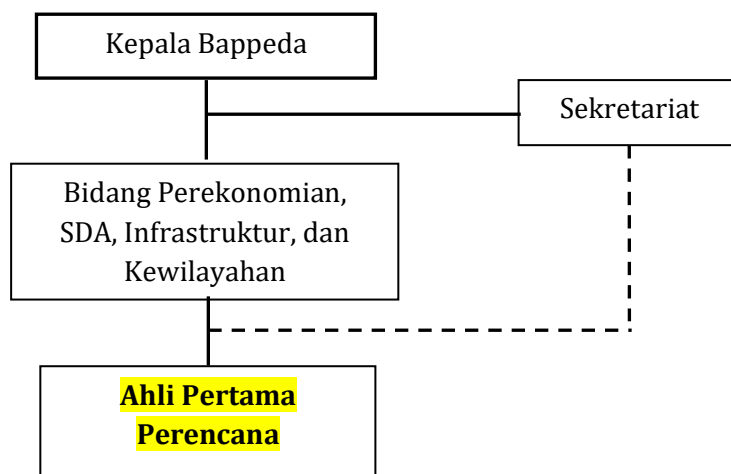
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Ahli Pertama Perencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Permasalahan
2. Merumuskan Permasalahan
3. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder
4. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer
5. Mengolah Data dan Informasi
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data
7. Menganalisis Data dan Informasi
8. Menyajikan Data dan Informas
9. Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
10. Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan
11. Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Ahli Pertama Perencana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Calon Ahli Pertama Perencana pada
Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bahan kerja yang tersusun	1 dokumen
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan yang tersusun	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Ahli Pertama Perencana
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan	Jumlah bahan kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah					
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Rata-rata Capaian					100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan IV adalah 4 (satu) dokumen dengan realisasi sebesar 100%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Ahli Pertama Perencana pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

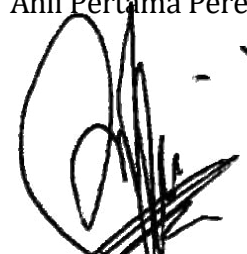
Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui

Mengetahui
Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan
Infrastruktur Wilayah,


IMRON ROSYIDI, S. Pi, M. App. Sc.
NIP. 19780529/200212 1 003

Ahli Pertama Perencana,


ROLAN FIRMANASARI, S. PWK.
NIP. 19890720 202203 2 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

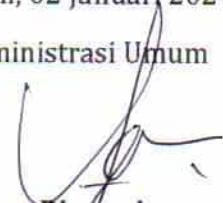
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagaibagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingka tefektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Pengadministrasi Umum



Johan Rizqoni

Penata Muda (III/a)

NIP. 19660901 200701 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Tugas Jabatan.....	1
B Struktur Jabatan.....	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	3
A Perjanjian Kinerja.....	3
B Capaian Kinerja.....	4
BAB III PENUTUP.....	6
A Kesimpulan.....	6
B Rekomendasi.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	2
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

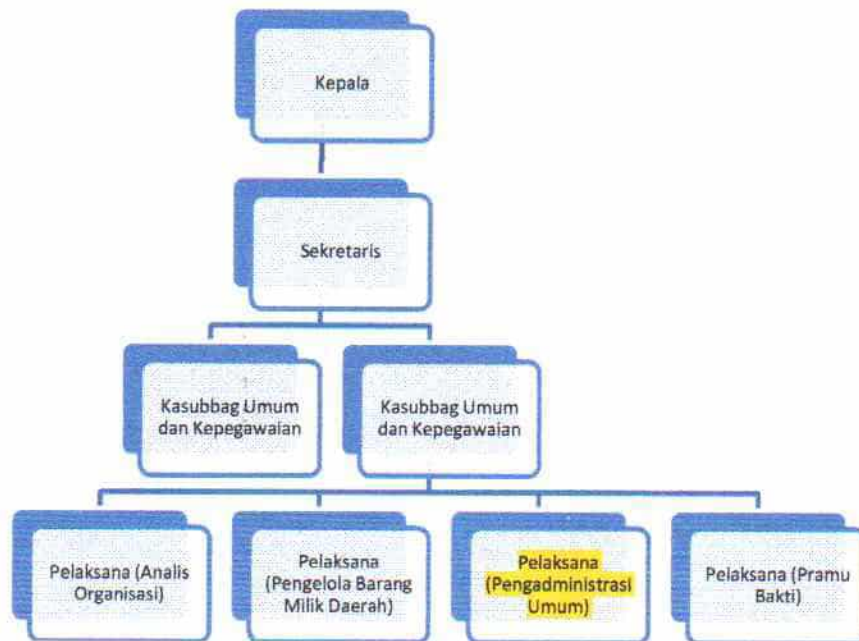
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencairan;
2. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Mengumpulkan Arsip-arsip/Dokumen/Surat sebagai bahan informasi	Jumlah Dokumen Pencatatan Surat/Dokumen/Berkas	2400 dokumen
2	Mengelola Arsip-arsip/Dokumen/Surat sebagai bahan informasi	Jumlah Pengantar Surat/Dokumen/Berkas	2400 dokumen
3	Mengelola Arsip-arsip/Dokumen/Surat sebagai bahan informasi	Jumlah terlaksananya pengelompokan surat/dokumen/berkas	2400 dokumen
4	Membuat Administrasi dan laporan peminjaman arsip/dokumen/berkas	Jumlah terlaksananya pengurusan administrasi surat/dokumen/berkas	6 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi/Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang/Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah/Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Mengumpulkan Arsip-arsip/Dokumen/Surat sebagai bahan informasi	Jumlah Dokumen Pencatatan Surat/Dokumen/Ber kas	2400 dokumen	2400 dokumen	2400 dokumen	100%
2	Mengelola Arsip-arsip/Dokumen/Surat sebagai bahan informasi	Jumlah Pengantar Surat/Dokumen/Ber kas	2400 dokumen	2400 dokumen	2400 dokumen	100%
3	Mengelola Arsip-arsip/Dokumen/Surat sebagai bahan informasi	Jumlah terlaksananya pengelompokan surat/dokumen/berkas	2400 dokumen	2400 dokumen	2400 dokumen	100%
4	Membuat Administrasi dan laporan peminjaman arsip/dokumen/berkas	Jumlah terlaksananya pengurusan administrasi surat/dokumen/berkas	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori "sangat berhasil", adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan bidang-bidang terkait, terutama dalam keteraturan kearsipan dan surat-menyurat di lingkungan Bappeda Kota Pekalongan;
2. Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pekalongan dalam hal penataan arsip di lingkungan Bappeda Kota Pekalongan;
3. Selalu meng-*update* peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penataan arsip.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil"

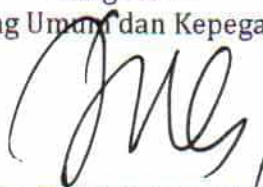
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu keteraturan dalam penataan arsip dan surat-menyurat agar menunjang kinerja organisasi agar lebih optimal;
2. Perlu evaluasi tiap bulan, sehingga apabila ada kendala dalam penataan arsip dapat segera teratasi

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Dewi Husnulniaty, S.Mn
NIP.19721128 199803 2 007

Pengadministrasi Umum,



Iohan Rizqoni
NIP. 19660901 200701 1 013

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH



**“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN”**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik

Daerah



Fitria Syifa Azzahra, A.Md. T

Pengatur/ Ilc

NIP. 19980330 202012 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023	3
TABEL 2.2	PENGUKURAN DENGAN SKALA ORDINAL	4
TABEL 2.3	PENGUKURAN KINERJA PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023	5

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI	2
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59.B Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. menyusun rencana kegiatan penyedia bahan logistik kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
3. Melakukan pembayaran dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
4. Melakukan pembayaran dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
6. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
7. Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Jumlah Bahan program kerja pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah	2 Dokumen
2	Menyusun rencana kegiatan penyedia bahan logistic kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Jumlah pemantauan data pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan	12 Bulan
3	Melakukan pembayaran dan Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	12 Laporan
4	Melakukan pembayaran dan Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sub kegiatan Rapat	Jumlah laporan pertanggung jawaban Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang	170 Laporan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	dilaksanakan	
5	Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana;	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	52 Kegiatan
6	Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;	Jumlah koordinasi pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan	52 Kegiatan
7	Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;	Laporan hasil pelaksanaan tugas	4 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Jumlah Bahan program kerja pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah	2 Dokumen	2	2	100
2	Menyusun rencana kegiatan penyedia bahan logistic kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Jumlah pemantauan data pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Melakukan pembayaran dan Menyusun laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan Jasa	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	pertanggungjawaban keuangan kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan				
4	Melakukan pembayaran dan Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Jumlah laporan pertanggung jawaban Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	170 Laporan	170 Laporan	170 Laporan	100
5	Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana;	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	52 Kegiatan	52 Kegiatan	52 Kegiatan	100
6	Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;	Jumlah koordinasi pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan	52 Kegiatan	52 Kegiatan	52 Kegiatan	100
7	Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;	Laporan hasil pelaksanaan tugas	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
Rata-rata Capaian						100

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Dewi Husnulniaty S.Mn

NIP. 19721128 199803 2 007

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik
Daerah



Fitria Syifa Azzahra A.Md.T

NIP. 19980330 202012 2 006

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2024
Pengadministrasi Umum,



Nor Romadhon

NIP. 19780822 200701 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan.....	1
B Struktur Jabatan.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	3
A Perjanjian Kinerja.....	3
B Capaian Kinerja.....	4
BAB III PENUTUP.....	5
A Kesimpulan.....	5
B Rekomendasi.....	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023.....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	2
-------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

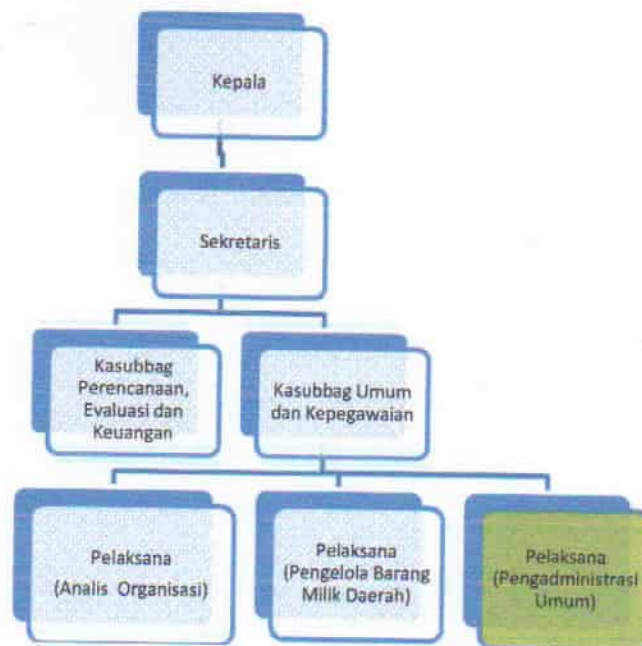
1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja
 - Melaksanakan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)
 - Membuat laporan
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja
 - Melaksanakan arahan pimpinan
 - Membuat laporan
3. Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja
 - Melaksanakan pemeliharaan/perawatan/pembersihan prasarana dan sarana
 - Membuat laporan
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja

- Melaksanakan pemeliharaan /perawatan /pembersihan prasarana dan sarana
 - Melakukan pemeliharaan objek kerja
 - Membuat laporan
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.
- Menyiapkan bahan
 - Membuat Laporan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12
2	Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12
3	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Kegiatan	12
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Kegiatan	12
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas	Laporan	12

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal seperti pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

SkalaOrdinal	Predikat/Kategori
90.1s.d. lebih	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
75.1s.d. 90	Tinggi/Berhasil
65.1s.d.75	Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65	Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50	Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umu pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umu pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12	12	12	100
2	Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12	12	12	100
3	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Kegiatan	12	12	12	100
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Kegiatan	12	12	12	100
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas	Laporan	12	12	12	100
Rata-rata Capaian						100

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Baik"

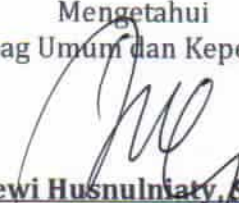
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan

Pekalongan, 02 Januari 2024

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Dewi Husnulniaty, S.Mn

NIP.19721128 199803 2 007

Pengadministrasi Umum,


Nor Romadhon

NIP. 19780822 20070 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
ANALIS PERENCANAAN



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Selain itu, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024
Analis Perencanaan

Ginayas Farida, S. Si
Penata Muda (III/b)
NIP. 19870223 201903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	2
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023	5

BAB I

PENDAHULUAN

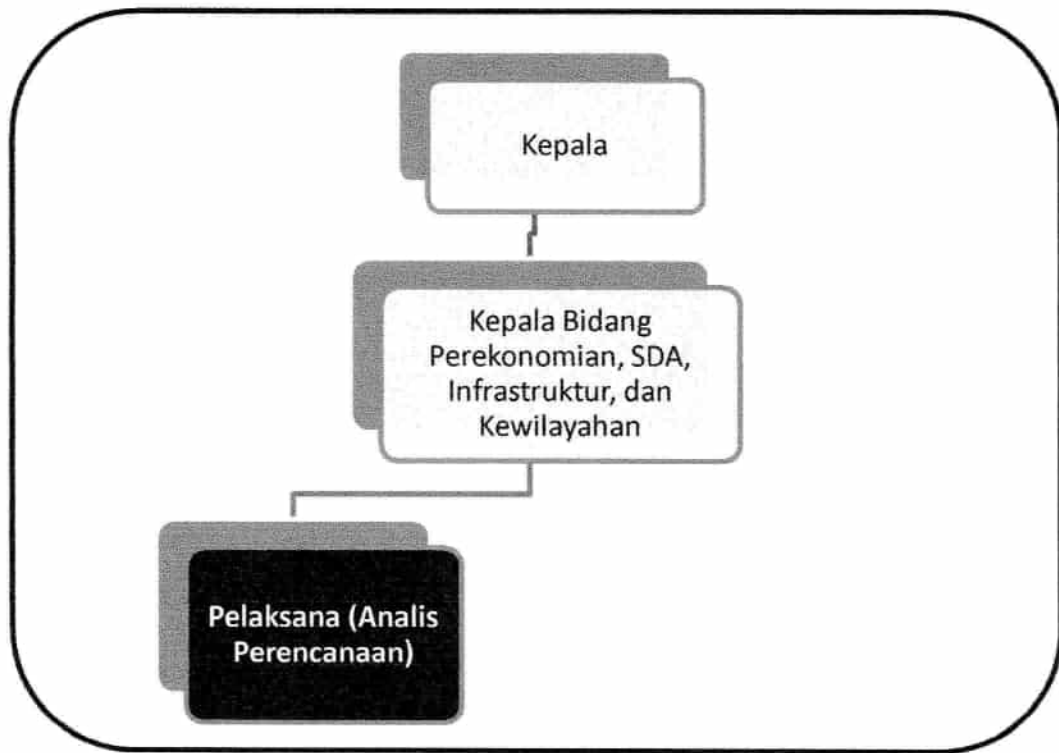
A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.C Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Analisis Perencanaan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja, meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kajian perencanaan urusan ekonomi berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi perencanaan urusan ekonomi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Nilai Indeks Prestasi (IP) Tahun Ajaran 2023/2024 pada Magister Geo Informasi untuk Manajemen Bencana UGM.	3,8

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Nilai Indeks Prestasi (IP) Tahun Ajaran 2023/2024 pada Magister Geo Informasi untuk Manajemen Bencana UGM.	3,8	3,8	100%
Rata-Rata Capaian					100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

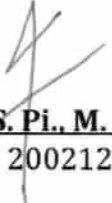
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Perencanaan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

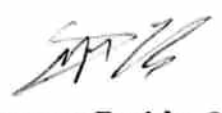
1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar target indikator kinerja ke depan tetap dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan tetap tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Mengetahui,
Kabid Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan


Imron Rosyidi, S. Pi., M. App. Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

Analis Perencanaan,


Ginayas Farida, S. Si.
NIP. 19870223 201903 2 003